

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOLOK**  
**TAHUN 2024**

Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan Yang Dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p><b>Urusan Pemerintahan :</b> Bidang Komunikasi dan Informatika</p> <p><b>Program:</b> Informasi dan Komunikasi Publik</p> <p><b>Kegiatan :</b> Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Penyebarluasan informasi melalui media baik media sosial maupun media elektronik lebih efektif</li> <li>Jumlah Penduduk Kabupaten</li> </ol>	<p><b>Akses:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya daerah yang belum terjangkau oleh jaringan internet (blank spot)</li> </ul> <p><b>Partisipasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam mengakses informasi terutama kegiatan pembangunan pemerintah daerah</li> </ul> <p><b>Kontrol:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya media sosial dan elektronik</li> </ul> <p><b>Manfaat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Semakin terbukanya</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya penyebaran informasi terutama kegiatan pembangunan pemerintah daerah terutama melalui media sosial dan media elektronik</li> <li>Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam pembuatan konten</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya masyarakat yang tidak dapat mengakses informasi pembangunan pemerintah daerah</li> <li>Kurangnya aktifitas perempuan dalam mengakses informasi pembangunan pemerintah daerah melalui</li> </ol>	Meningkatnya keterbukaan informasi pembangunan pemerintah daerah melalui media sosial dan elektronik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan konten</li> <li>Membentuk Bako Humas dan Satgas Media Sosial dan elektronik dalam percepatan penyebaran informasi</li> <li>Menyusun regulasi tentang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Penduduk Kabupaten Solok berjumlah sebanyak 397.276 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 199.165 dan perempuan sebanyak 198.111 jiwa</li> <li>Jumlah masyarakat yang mengakses informasi melalui media</li> </ol>	<p><b>Indikator :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pegawai yang ditingkatkan SDM nya dalam pengelolaan konten</li> <li>Jumlah regulasi yang disusun</li> </ol> <p><b>Input :</b> 250.000.000</p> <p><b>Output:</b> Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM</p>

<p><b>Sub kegiatan:</b> Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik</p> <p><b>Tujuan:</b> Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Solok berjumlah sebanyak 397.276 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 199.165 dan perempuan sebanyak 198.111 jiwa</p> <p>4. Jumlah masyarakat yang mengakses informasi melalui media sosial dan elektronik berbanding 59 : 41%</p>	<p>informasinya publik kepada masyarakat</p>	<p>3. Keterbatasan anggaran</p>	<p>media sosial dan media elektronik</p> <p>3. Kurang menariknya pengemasan konten dalam penyebaran informasi</p>		<p>kerjasama media, pengelolaan website OPD dan kecamatan</p>	<p>sosial dan elektronik berbanding 59 : 41%</p> <p>3. Jumlah website OPD, kematan , RSUD di tambah satu websiten pemkab solok berjumlah 43</p>	<p>pengelola konten dan tersusunya regulasi</p> <p><b>Outcome:</b> Meningkatnya kuliatas konten dalam penyebarluasan infromasi publik</p>
--	--	--	---------------------------------	---	--	---	---	---

Arosuka,      Maret 2023  
Kepala



**TETA MIDRA, S.STP, S.Si**  
**NIP 19821022 200112 2 001**

## GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

NAMA OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOLOK

TAHUN : 2023

<b>Program</b>	Program Informasi dan Komunikasi Publik
<b>Kode Program</b>	2.16.02
<b>Analisis Situasi</b>	<p><b><u>Data Pembuka :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>2. Penyebarluasan informasi melalui media baik media sosial maupun media elektronik lebih efektif</li><li>3. Jumlah Penduduk Kabupaten Solok berjumlah sebanyak 397.276 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 199.165 dan perempuan sebanyak 198.111 jiwa</li><li>4. Jumlah masyarakat yang mengakses informasi melalui media sosial dan elektronik berbanding 59 : 41%</li></ol> <p><b><u>Faktor kesenjangan:</u></b></p> <p><i>Akses:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Masih adanya daerah yang belum terjangkau oleh jaringan internet (blank spot)</li></ul> <p><i>Partisipasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam mengakses informasi terutama kegiatan pembangunan pemerintah daerah</li></ul> <p><i>Kontrol:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya media sosial dan elektronik</li></ul> <p><i>Manfaat:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Semakin terbukanya informasinya publik kepada masyarakat</li></ul> <p><b><u>Penyebab Kesenjangan Internal:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih kurangnya penyebarluasan informasi terutama kegiatan pembangunan pemerintah daerah terutama melalui media sosial dan media elektronik</li><li>2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam pembuatan konten</li><li>3. Keterbatasan anggaran</li></ol>

	<p><b><u>Penyebab Eksternal:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya masyarakat yang tidak dapat mengakses informasi pembangunan pemerintah daerah</li> <li>2. Kurangnya aktifnya perempuan dalam mengakses informasi pembangunan pemerintah daerah melalui media sosial dan media elektronik</li> <li>3. Kurang menariknya pengemasan konten dalam penyebarluasan informasi</li> </ol>
<b>Capaian Program</b>	<p><b>Tolak Ukur :</b> Meningkatnya keterbukaan informasi pembangunan pemerintah daerah melalui media sosial dan elektronik</p> <p><b>Capaian Program :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pegawai yang ditingkatkan SDM nya dalam pengelolaan konten</li> <li>2. Jumlah regulasi yang disusun</li> </ol>
<b>Jumlah Anggaran</b>	Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)
<b>Rencana Aksi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan konten</li> <li>2. Membentuk Bako Humas dan Satgas Media Sosial dan elektronik untuk mempercepat penyebarluasan informasi</li> <li>3. Menyusun regulasi tentang kerjasama media, pengelolaan website OPD dan kecamatan</li> </ol>
	<b>Masukan :</b> Rp.250.000.000,-
	<b>Keluaran :</b> Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pengelola konten dan tersusunnya regulasi
	<b>Hasil :</b> Meningkatnya kuliatas konten dalam penyebarluasan infromasi publik

Arosuka, Maret 2023  
Kepala



  
**TETA MIDRA, S.STP, S.Si**  
**NIP 19821022 200112 2 001**

## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

### DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan Yang Dianalisis	Data PembukaWawas an	Faktor Kesenjangan	Isu Gender		Reformulasi Tujuan	RencanaAksi	Pengukuran Hasil	
			Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal			Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
<b>Program :</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  <b>Kegiatan:</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  <b>Tujuan :</b> Tempeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1. Permen PU No 38 tahun 2007 dan PP. 6 tahun 2021 tentang bangunan Gedung.  laki-laki.  2. Jumlah ASN/Non ASN Dispersip 45 orang terdiri dari 19 orang perempuan dan 26 orang	<b>Akses :</b> -Tidak seimbang toilet laki-laki dan perempuan di kantor /Perustakaan Umu Daerah OPD.  <b>Peran :</b> -Kurang nyamanannya perempuan pergi ke toilet karena kurangnya sarana dan prasarana  <b>Kontrol :</b> Kurangnya pemahaman tim teknis dan perencanaan dalam membuat toilet yang	1. Sosialisasi Permen PU No 38 tahun 2007 dan PP. 6 tahun 2021 tentang bangunan Gedung yang responsive gender.  2. Kurangnya pemahaman tim teknis dan perencanaan dalam membuat toilet yang responsive gender  3. Masih kurangnya koordinasi antara tim teknis perencanaan dan pengawas.	Kurangnya Koordinasi dengan SDM pengawas DPU tentang bangunan yang responsive gender.	Meningkatkan sarana dan prasarana toilet yang responsive Gender.	1. Melakukan sosialisasi tentang toilet yang responsive gender. (Permen PU No 38 tahun 2007 dan PP. 6 tahun 2021 tentang bangunan Gedung yang responsive gender).  2. Melaksanakan pembangunan n pembuatan toilet yang responsive gender.  3. Meningkatkan n koordinasi	Jumlah ASN/Non ASN Dispersip 45 orang terdiri dari 19 orang perempuan dan 26 orang	<b>Kegiatan</b> sosialisasi tentang toilet responsive gender  <b>Peserta Sosialisasi:</b> 45 Orang  <b>Indikator:</b> Terlaksananya kegiatan yang responsive gender.  <b>Input :</b> untuk Sosialisasi toilet yang responsive gender : Rp 3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah)  untuk pemeliharaan toilet yang responsive gender : Rp 22.000.000 ( Dua puluh dua Juta Rupiah )

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan Yang Dianalisis 1	Data Pembuka Wawas an 2	Faktor Kesenjangan 3	Isu Gender Sebab Kesenjangan Internal 4	Sebab Kesenjangan Eksternal 5	Kebijakan dan Rencana Kedepan Reformulasi Tujuan 6	Rencana Aksi 7	Data Dasar (Base-Line) 8	Indikator Gender 9
	gender ada 1 unit	responsive				antara tim teknis perencana dan pengawas.		Output: Terpeliharanya Toilet yang responsive Gender : 2 buah toilet beserta sarana dan prasarananya.  Toilet yang responsive gender : 2 bh toilet yang responsive gender.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

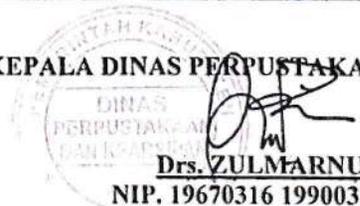
  
Drs. ZULMARNUS  
NIP. 19670316 199003 1 005

## GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

NAMA OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. SOLOK  
TAHUN : 2024

Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	
Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Rp.25.000.000,- (Dua Puluh lima Juta Rupiah)	
Indikator Kinerja Kegiatan	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dengan memperhatikan pengarusutamaan gender.	
Output Kegiatan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang responsive gender.	
Analisis Situasi	<p>Kurangnya toilet yang responsive gender di kantor .</p> <p><b><u>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</u></b></p> <p><b>Akses :</b> Tidak seimbangya toilet laki-laki dan perempuan di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.</p> <p><b>Peran :</b> Kurangnya sarana dan prasana toilet yang responsive gender.</p> <p><b>Kontrol :</b> Kurangnya pemahaman tim teknis dan perencana dalam membuat toilet yang responsive gender.</p> <p><b>Manfaat :</b> Menciptakan kenyamanan bagi perempuan pergi ketoilet yang responsive gender.</p> <p><b><u>Penyebab Internal :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Permen PU No. 38 tahun 2007 dan PP. 6 tahun 2021 tentang bangunan Gedung yang responsive gender.</li> <li>2. Kurangnya pemahaman tim teknis dan perencana dalam membuat toilet yang responsive gender.</li> <li>3. Masih kurangnya koordinasi antara tim teknis perencana dan pengawas.</li> </ol> <p><b><u>Penyebab Eksternal :</u></b> Kurangnya SDM pengawas DPU tentang bangunan yang responsive gender.</p>	
Rencana Aksi	Kegiatan	1. Melaksanakan rehabilitasi pembuatan toilet yang responsive gender.
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah )	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Toilet yang responsive gender : 2 buah toilet beserta sarana dan prasarananya	

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

  
**Drs. ZULMARNUS**  
 NIP. 19670316 199003 1 005

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

**SKPD** : Bapelitbang Kabupaten Solok  
**TAHUN**  
**ANGGARAN** : 2023

**PROGRAM** Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

**KODE PROGRAM** 5.01.01

**KEGIATAN** Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

**SUB KEGIATAN** Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

**HASIL/OUTPUT** Terlaksananya Koordinasi Musrenbang RKPD Kabupaten

**ANALISIS  
SITUASI**

**1. Data Pembuka Wawasan**

- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
- Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Solok
- Jumlah undangan sebanyak 350 undangan.

**2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender**

➤ Faktor Kesenjangan

➤ **Akses**

Kurangnya minat perempuan untuk ikut andil dalam Musrenbang RKPD dikarenakan mayoritas yang berpartisipasi aktif dalam proses musyawarah sampai dengan pengambilan keputusan adalah laki-laki

➤ **Partisipasi**

Karena untuk mengikuti Musrenbang RKPD, perlu memiliki wawasan yang luas dan pemikiran terbuka guna menggali isu-isu serta permasalahan strategis sehingga tercapainya perencanaan pembangunan yang sesuai dengan visi-misi daerah dan tentunya berkualitas.

➤ **Kontrol**

Belum optimalnya pengawasan dari Kasubid-kasubid Bidang PPEPD

➤ **Manfaat**

Lebih berkualitasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah karena musyawarah untuk mufakat pada Musrenbang RKPD tidak hanya didominasi oleh laki-laki (70%) tetapi juga dari perempuan (30%) yang diketahui mempunyai sensitivitas terhadap hal-hal kecil dan hal-hal yang bersifat detail (70%) dibandingkan dengan laki-laki (30%).

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyebab Internal <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SDM perempuan masih kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas</li> </ul> </li> <li>b. Penyebab Eksternal <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terbatasnya peserta Musrenbang RKPD, dari perwakilan setiap instansi/SKPD yang diundang</li> <li>➤ Perempuan lebih cenderung bersikap nurut pada setiap keputusan yang diambil</li> <li>➤ Perempuan cenderung kurang aktif berpartisipasi dikarenakan keterbatasan ide</li> </ul> </li> </ul>	
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<b>1. Tolak Ukur</b> Meningkatkan jumlah partisipan perempuan yang mengikuti Musrenbang RKPD Kab. Solok	
	<b>2. Indikator dan Target Kinerja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terlaksananya Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2023</li> </ul> <u>Input:</u> Rp. 77.481.000,- <u>Output:</u> Terlaksananya Koordinasi Musrenbang RKPD Kabupaten <u>Outcome:</u> Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan Dokumen RPJMD	
<b>RENCANA AKSI</b>	<b>KOMPONEN 1</b>	- Terlaksananya Musrenbang RKPD Kabupaten
		<b>Tujuan</b> Meningkatkan jumlah partisipan perempuan yang ikut andil untuk menggali isu-isu serta permasalahan strategis pembangunan daerah pada Musrenbang RKPD
		<b>Alokasi Anggaran</b> Rp. 77.481.000,-

Arosuka, 28 Maret 2023



### MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok (BAPELITBANG)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan</b>	<b>Data Pembuka Wawasan</b>	<b>ISU GENDER : Peserta Musrenbang Masih didominasi oleh laki-laki</b>						
		<b>Faktor Kesenjangan</b>	<b>Sebab Kesenjangan Internal</b>	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>	<b>Reformulasi Tujuan</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Basis Data (Base-Line)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>Program :</b> Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional	<b>Akses :</b> Karena untuk mengikuti Musrenbang Tahun 2023 (Penyusunan RKPD Tahun 2024), perlu memiliki wawasan yang luas dan pemikiran terbuka guna menggalis isu-isu serta permasalahan strategis sehingga tercapainya perencanaan pembangunan yang sesuai dengan visi-misi daerah dan tentunya berkualitas.	- SDM perempuan masih kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas.  - Terbatasnya peserta Musrenbang Tahun 2023 untuk penyusunan RKPD Tahun 2024, hanya 3 perwakilan dari setiap instansi yang diundang.	- Kurangnya dukungan keluarga / suami bagi perempuan untuk mengikuti musrenbang.  - Perempuan cenderung kurang aktif berpartisipasi dikarenakan keterbatasan ide	Meningkatkan jumlah partisipan perempuan yang mengikuti Musrenbang Tahun 2023 (Penyusunan RKPD 2024) Kabupaten Solok.	- Terlaksananya Musrenbang Tahun 2023 (Penyusunan RKPD 2024) dengan baik dan sesuai sasaran.  - Pelaksanaan Musrenbang diawali dengan Musrenbang Tingkat Nagari, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Verifikasi data melalui Forum SKPD	- Jumlah Peserta Musrenbang Tahun 2023 untuk penyusunan RKPD Tahun 2024 sebanyak 350 Undangan terdiri dari: - DPRD 4 orang (3 L/P 1) - Kapotes 1 orang (1 L/P 0) - Kodim 1 orang (1 L/P 0) - Kepala BPS 2 Orang (2 L/P 0) - Ketua TP-PKK Kabupaten Solok 1 Orang (0 L/P 1) - Asisten 3 orang (3 L/P 0) - Staf Ahli Bupati 2 Orang (2 L/P 0) - SKPD 180 orang (97 L/P 83) - Camat 14 orang (13 L/P 1)	<b>Indikator Kinerja</b> Terlaksananya Musrenbang Tahun 2023 untuk Penyusunan RKPD Tahun 2024
<b>Kegiatan :</b> Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.	- Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Solok	- Jumlah Peserta Musrenbang Tahun 2023 untuk penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah 350 Undangan terdiri dari:	- Kurangnya Pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektor.	- Partisipasi Masyarakat, Bundo Kandung dan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023 untuk penyusunan RKPD Tahun 2024 masih kurang.				<b>Input</b> Rp. 77.481.000,-  <b>Output:</b> Terlaksananya Koordinasi Musrenbang RKPD Kabupaten.
<b>Tujuan :</b> Meningkatkan jumlah partisipan perempuan yang ikut andil untuk menggalis isu-isu serta permasalahan strategis pembangunan daerah pada Musrenbang Tahun 2023 untuk penyusunan RKPD Tahun 2024.		<b>Partisipasi :</b> Kurangnya minat perempuan untuk ikut andil dalam Musrenbang Tahun 2023 (Penyusunan RKPD Tahun 2024) dikarenakan						<b>Outcome:</b> Persentase keselarasan dokumen RKPD ke dalam Dokumen RPJMD.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan</b>	<b>Data Pembuka Wawasan</b>	<b>ISU GENDER : Peserta Musrenbang Masih didominasi oleh laki-laki</b>			<b>REBUJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN</b>	<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Basis Data (Base-Line)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
		<b>Faktor Kesenjangan</b>	<b>Sebab Kesenjangan Internal</b>	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPRD 4 orang (3 L/P 1)</li> <li>- Kapotres 1 orang (1 L/P 0)</li> <li>- Kodim 1 orang (1 L/P 0)</li> <li>- Kepala BPS 2 Orang (2 L/P 0)</li> <li>- Ketua TP-PKK Kabupaten Solok 1 Orang (0 L/P 1)</li> <li>- Asisten 3 orang (3 L/P 0)</li> <li>- Staf Ahli Bupati 2 Orang (2 L/P 0)</li> <li>- SKPD 180 orang (97 L/P 83)</li> <li>- Camat 14 orang (13 L/P 1)</li> <li>- Wali Nagari 74 Orang (67 L/P 7)</li> <li>- Delegasi kecamatan 42 Orang (34 L/P 8)</li> <li>- Bundo kanduang (3 P/L 0)</li> <li>- LSM (5 L/P 0)</li> <li>- Mitra Bank (1 L/P 0),</li> <li>- Media (20 L/P 6)</li> </ul>	<p>mayoritas yang berpartisipasi aktif dalam proses musyawarah sampai dengan pengambilan keputusan adalah laki-laki.</p> <p><b>Kontrol :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pengawasan dari Kasubid pada bidang PPEPD.</li> <li>- Setiap Perempuan dan laki-laki diberi kesempatan yang sama dalam pengambilan putusan.</li> <li>- Setiap yang diusulkan perempuan jarang yang langsung terpenuhi.</li> </ul> <p><b>Manfaat :</b></p> <p>Lebih berkualitasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah karena musyawarah untuk mufakat pada Musrenbang Tahun 2023 untuk Penyusunan RRPD</p>	<p>- Dalam pelaksanaan Musrenbang yang perlu diarahkan kepada masyarakat adalah manfaat dari pelaksanaan musrenbang itu sendiri.</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wali Nagari 74 Orang (67 L/P 7)</li> <li>- Delegasi kecamatan 42 Orang (34 L/P 8)</li> <li>- Bundo kanduang (3 P/L 0)</li> <li>- LSM (5 L/P 0)</li> <li>- Mitra Bank (1 L/P 0),</li> <li>- Media (20 L/P 6)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peserta Musrenbang Tahun 2023 (Penyusunan RRPD Tahun 2024) terdiri dari</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peserta Musrenbang Tahun 2023 untuk penyusunan RRPD Tahun 2024 terdiri dari 350 orang yang hadir diantaranya 247 orang laki-laki dan 103 orang perempuan.</li> </ul>	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	
<b>Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan</b>	<b>Data Pembuka Wawasan</b>	<b>ISU GENDER : Peserta Musrenbang Masih didominasi oleh laki-laki</b>			<b>KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN</b>	<b>REFORMULASI Tujuan</b>	<b>RENCANA Aksi</b>	<b>Basis Data (Base-Line)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
		<b>Faktor Kesenjangan</b>	<b>Sebab Kesenjangan Internal</b>	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>					
	350 orang yang hadir antaranya 247 orang laki-laki dan 103 orang perempuan.  - Juknis Pelaksanaan Musrenbang.  - Diketahui partisipasi perempuan sangat rendah dalam mengikuti Musrenbang, dapat dilihat dari Absensi selama 3 tahun terakhir sebagai berikut:  - <b>Tahun 2020</b> peserta Musrenbang RPPD 400 orang (345 Laki-laki dan 35 Perempuan) - <b>Tahun 2021</b> peserta Musrenbang RPPD 250 orang (207 Laki-laki 43 Perempuan) - <b>Tahun 2022</b> Peserta	Tahun 2024 tidak hanya didominasi oleh laki-laki (70%) tetapi juga dari perempuan (30%) yang diketahui mempunyai sensitivitas terhadap hal-hal kecil dan hal-hal yang bersifat detail (70%) jika dibandingkan dengan laki-laki sekitar (30%).							

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan</b>	<b>Data Pembuka Wawasan</b>  Musrenbang RKPD 250 Orang (197 Laki-laki dan 96 orang perempuan)  - Penyebab rendahnya minat perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD dikarenakan kesibukan ibu rumah tangga yang dikerjakan.	<b>ISU GENDER : Peserta Musrenbang Masih didominasi oleh laki-laki</b>			<b>KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN</b>	<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Basis Data (Base-Line)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
		<b>Faktor Kesenjangan</b>	<b>Sebab Kesenjangan Internal</b>	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>				

Arosuka, 28 Maret 2023

**PI KEPALA BAPELITBANG**

**Sekretaris**



**8 GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan Yang Dianalisis	Data Pembuka Wawa san	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjan gan Internal	Sebab Kesenjanga n Eksternal	Reformulasi T ujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p><b>Program :</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>Kegiatan:</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p><b>Tujuan :</b> Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor</p>	<p>1. Permen PU No 38 tahun 2007 dan PP. 6 tahun 2021 tentang bangunan Gedung.</p> <p>2. Jumlah ASN dan THL 88 orang terdiri dari 43 orang perempuan dan 55 orang laki-laki.</p> <p>3. Jumlah Toilet yang ada 10 buah. Untuk laki-laki 4 buah dan perempuan 6 buah.</p> <p>4. Jumlah toilet yang sudah responsive gender ada 2 buah</p>	<p><b>Akses :</b> Tidak seimbangnya toilet laki-laki dan perempuan di kantor BKD.</p> <p><b>Peran :</b> Kurangnya sarana dan prasana toilet yang responsive gender.</p> <p><b>Kontrol :</b> Kurangnya pemahaman tim teknis dan perencana dalam membuat toilet yang responsive gender.</p>	<p>1. Sosialisasi Permen PU No 38 tahun 2007 dan PP. 6 tahun 2021 tentang bangunan Gedung yang responsive gender.</p> <p>2. Kurangnya pemahaman tim teknis dan perencana dalam membuat toilet yang responsive gender</p> <p>3. Masih kurangnya koordinasi antara tim teknis perencana dan pengawas.</p>	<p>1. Kurangnya SDM pengawas DPU tentang bangunan yang responsive gender.</p>	<p>Meingkatkan sarana dan prasarana toilet yang responsive Gender.</p>	<p>1. Melakukan sosialisasi tentang toilet yang responsive gender. (Permen PU No 38 tahun 2007 dan PP. 6 tahun 2021 tentang bangunan Gedung yang responsive gender).</p> <p>2. Melaksanakan pembangunan pembuatan toilet yang responsive gender.</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi antara tim teknis perencana dan pengawas.</p>	<p>1. Jumlah ASN dan THL 88 orang terdiri dari 43 orang perempuan dan 55 orang laki-laki.</p>	<p><b>Kegiatan</b> sosialisasi tentang toilet responsive gender</p> <p><b>Peserta Sosialisasi:</b> 50 Orang</p> <p><b>Indikator:</b> Terlaksananya kegiatan yang responsive gender.</p> <p><b>Input :</b> untuk Sosialisasi toilet yang responsive gender : Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)</p> <p>untuk pemeliharaan toilet yang responsive gender : Rp 12.500.000 ( Dua</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan Yang Dianalisis	Data Pembuka Wawa san	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjan gan Internal	Sebab Kesenjanga n Eksternal	Reformulasi T ujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>BelasJuta Lima Ratus Ribu Rupiah )</p> <p><b>Output:</b> Terpeliharanya Toilet yang responsive Gender : 2 buah toilet beserta sarana dan prasarananya.</p> <p><b>Toilet yang resposive gender : 2 bh toilet yang responsive gender.</b></p>

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**

  
**INDRA GUSNADY, SE.M.Si.**  
**NIP. 197008041998031006**

## **GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)**

**NAMA OPD** : BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOLOK  
**TAHUN** : 2024

Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	
Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	
Anggaran Sub Kegiatan	Rp.47.370.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)	
Indikator Kinerja Kegiatan	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dengan memperhatikan pengarusutamaan gender.	
Output Kegiatan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang responsive gender.	
Analisis Situasi	<p>Kurangnya toilet yang responsive gender di kantor .</p> <p><b><u>Isudan Faktor Kesenjangan Gender</u></b></p> <p><b>Akses :</b> Tidak seimbangya toilet laki-laki dan perempuan di kantor BKD.</p> <p><b>Peran :</b> Kurangnya sarana dan prasana toilet yang responsive gender.</p> <p><b>Kontrol :</b> Kurangnya pemahaman tim teknis dan perencana dalam membuat toilet yang responsive gender.</p> <p><b>Manfaat :</b> Menciptakan kenyamanan bagi perempuan pergi ketoilet yang responsive gender.</p> <p><b><u>Penyebab Internal :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Permen PU No. 38 tahun 2007 dan PP. 6 tahun 2021 tentang bangunan Gedungyang responsive gender.</li> <li>2. Kurangnya pemahaman tim teknis dan perencana dalam membuat toilet yang responsive gender.</li> <li>3. Masih kurangnya koordinasi antara tim teknis perencana dan pengawas.</li> </ol> <p><b><u>Penyebab Eksternal :</u></b></p> <p>Kurangnya SDM pengawas DPU tentang bangunan yang responsive gender.</p>	
Rencana Aksi	Kegiatan	1. Melaksanakan rehabilitasi pembuatan toilet yang responsive gender.
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	1. Toilet yang responsive gender : 2 buah toilet beserta sarana dan prasarananya.	

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**

**INDRA GUSNADY, SE.M.Si**  
**NIP. 19700804 199803 1 006**

Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Kawasan	Isi Gender :	LangKAH 4 Sebab Kesenjangan Internal	LangKAH 5 Sebab Kesenjangan Eksternal	LangKAH 6 Kebijakan dan Rencana Kodepan	LangKAH 7 Rencana Aksi	LangKAH 8 Basis Data	LangKAH 9 Indikator Kerja	
									LangKAH 3 Faktor Kesenjangan
<p><b>Program:</b> Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p><b>Kegiatan:</b> Sertifikasi keterampilan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional</p> <p><b>Sub Kegiatan:</b> Pengembangan Kompetensi manajerial dan fungsional</p> <p><b>Tujuan:</b> Meningkatkan Kompetensi ASN (pejabat struktural eselon III) dalam rangka memenuhi kompetensi Manajerial Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok</p>	<p>11 Tahun 2017 sebagai mana telah dijabarkan dalam Peraturan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN</p> <p>Peraturan LAM No.16 Tahun 2019 yang sudah diubah dengan Peraturan LAM No 7 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan LAM No. 16 Tahun 2019 tentang Paubhan Kepernipran Administrator (PKA)</p>	<p>Partisipasi: - Pejabat struktural eselon III didominasi oleh 107 orang laki-laki (73,28 % dibandingkan perempuan berjumlah 39 orang (26,71%)</p> <p>Dari seluruh pejabat eselon III diatas yang sudah mengikuti Diklat PIM III (PKA) baru 6 orang (4,31%) terdiri dari 4 orang laki-laki (3,74%) dan 2 orang perempuan (5,13%)</p> <p>Yang belum mengikuti Diklat sebanyak 140 orang (95,89 % ) terdiri dari 103 orang laki-laki (94,87%) dan 37 orang perempuan (96,26%)</p> <p>Lebih Sedikit Pejabat Eselon III perempuan yang bersedia ikut dilatih (kepernipran) (PKA)</p> <p><b>Kontrol:</b> Masi kurangnya pengawasan oleh pengambil keputusan /kebijakan terhadap evaluasi ASN yg sdh mengikuti diklat</p> <p><b>Mandata:</b></p>	<p>Kurangnya Partisipasi Pejabat eselon III bergender perempuan mengikuti Diklat PIM III (PKA)</p>	<p>Belum optimalnya pembinaan kepada pejabat eselon III yang belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait (lintas sektor)</p> <p>Belum memenuhi syarat kepageawaan untuk dilatih PIM III (PKA)</p>	<p>Belum optimalnya pembinaan kepada pejabat eselon III yang belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait (lintas sektor)</p> <p>Kurangnya dukungan eselon II perempuan untuk mengikuti diklat</p> <p>Belum memenuhi syarat kepageawaan untuk dilatih PIM III (PKA)</p>	<p>Mengembangkan Kompetensi seluruh ASN (seluruh pejabat struktural eselon III baik laki-laki maupun perempuan) dalam rangka memenuhi Kompetensi Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok</p> <p>Meningkatkan pembinaan ke pejabat eselon III perempuan</p> <p>Meningkatkan jumlah kuota sesuai kebutuhan</p> <p>Mengkoordinasikan penglibatan sarana dan prasarana dengan (SSOH regional) bultingng di Sarso</p>	<p>Jumlah ASN yang menduduki jabatan eselon III sebanyak 146 orang terdiri dari 39 orang perempuan dan 107 laki-laki, dan yang telah mengikuti diklat PIM Tk. III (PKA) sebanyak 6 orang, terdiri dari 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jari eselon III yang belum mengikuti diklat PIM Tk. III (PKA) adalah sebanyak 140 orang yaitu 102 orang laki-laki dan 37 orang perempuan</p>	<p>1. Terlaksananya Diklat PIM III (PKA) untuk pejabat eselon III melalui pola konstrubui sebanyak 140 orang</p> <p>2. Melakukun pembinaan ke pejabat eselon III perempuan</p> <p>3. Memastikan jumlah kuota sesuai kebutuhan</p>	<p><b>Input:</b> Rp. 895.286.431,-</p> <p><b>Output:</b> Layanan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pejabat Eselon III (PKA)</p> <p><b>Outcome:</b> Peneratae Keluasan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</p>



**GENDER BUDGET STATEMENT  
(Pernyataan Anggaran Gender)**

SKPD : **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
TAHUN : **2024**

<b>Program</b>	Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>Kode Program</b>	5.04.02
<b>Kegiatan</b>	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
<b>Sub Kegiatan</b>	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
<b>Output Kegiatan</b>	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Eselon III (PKA)
<b>Analisis Situasi</b>	<p><b>1. <u>Data Pembuka Wawasan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai amanat pada PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagai mana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN menyebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan administrator (eselon III) adalah memiliki kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.</li> <li>- Peraturan LAN No.16 Tahun 2019 yang sudah diubah dengan Peraturan LAN No 7 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan LAN No. 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).</li> <li>- Jumlah ASN yang menduduki jabatan eselon III sebanyak 146 orang terdiri dari 39 orang perempuan dan 107 laki-laki, dan yang telah mengikuti diklat PIM Tk. III (PKA) sebanyak 6 orang, terdiri dari 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jadi eselon III yang belum mengikuti Diklat PIM Tk. III (PKA), adalah <b>sebanyak 103 orang laki-laki dan 37 orang perempuan.</b></li> </ul> <p><b>2. <u>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</u></b></p> <p><b>Isu :</b> Kurangnya Partisipasi Pejabat eselon III bergender perempuan mengikuti Diklat PIM Tk. III (PKA)</p> <p><b>a. Faktor Kesenjangan</b></p> <p><b>Akses :</b> Kurangnya Partisipasi Pejabat eselon III bergender perempuan mengikuti Diklat PIM Tk. III (PKA)</p> <p><b>Partisipasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya Partisipasi Pejabat eselon III bergender perempuan mengikuti Diklat PIM Tk. III (PKA).</li> <li>- Dari seluruh pejabat eselon III diatas yang sudah mengikuti Diklat PIM III (PKA) baru 6 orang (4.11%) terdiri dari 4 orang laki-laki (3.74%) dan 2 orang perempuan (5.13%)</li> <li>- Yang belum mengikuti Diklat sebanyak 140 orang (95.89 %) terdiri dari 103 orang laki-laki (94.87%) dan 37 orang perempuan (96.26%)</li> <li>- Lebih Sedikit Pejabat Eselon III perempuan yang bersedia ikut diklat kepemimpinan (PKA).</li> </ul> <p><b>Kontrol :</b> Masi kurangnya pengawasan oleh pengambil keputusan/ kebijakan terhadap evaluasi ASN yg sdh mengikuti diklat.</p> <p><b>Manfaat:</b> Tidak terdapat kesenjangan manfaat antara peserta Diklat PIM III (PKA) yang laki-laki maupun yang perempuan</p>

	<p><b>b. Penyebab Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya kualitas SDM pejabat eselon IV yang perempuan.</li> <li>- Belum optimalnya pembinaan kepada pejabat eselon IV yang perempuan.</li> <li>- Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait (lintas sektor).</li> <li>- Terbatasnya kuota peserta untuk mengikuti PIM Tk. III (PKA) dari penyelenggara.</li> </ul> <p><b>c. Penyebab Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya sarana prasarana (tempat penitipan bayi, ibu menyusui, tempat bermain anak) di tempat terselenggaranya Diklat. Karena Pola Diklat adalah pengiriman Peserta (Pola Kontribusi)</li> <li>- Kurangnya dukungan keluarga terhadap pejabat eselon III perempuan untuk mengikuti diklat.</li> <li>- Belum memenuhi syarat kepegawaian untuk diklat PIM (PKA).</li> </ul>	
<b>Rencana Aksi</b>	Komponen / Aktifitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Diklat PIM Tk. III (PKA) untuk pejabat eselon III melalui pola kontribusi.</li> <li>- Meningkatkan pembinaan ke pejabat eselon III perempuan.</li> <li>- Menambah jumlah kuota sesuai kebutuhan</li> <li>- Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait (lintas sektor)</li> <li>- Mengkoordinasikan peningkatan sarana dan prasarana dengan PSDM Regional Bukittinggi di baso</li> </ul>
	<b>Total Anggaran</b>	Rp. 805.286.431,- (Delapan Ratus Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
<b>Capaian Program</b> (di level kegiatan)	<p><b>Output</b> : Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Eselon III (PKA)</p> <p><b>Outcome</b> : Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</p>	

Arosuka, 20 Maret 2023  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



**AFRIALDI, SE.MM**  
NIP. 19750429 199403 1 002

## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<p><b>Program:</b> Program Penanggulangan Bencana</p> <p><b>Kegiatan:</b> Pelayaran Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</p> <p><b>Sub kegiatan:</b> Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota</p> <p><b>Tujuan:</b> Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Kebencanaan</p>	<p><b>Data Pemuka Wawasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana.</li> </ul> <p>Jumlah penduduk : 402.295 orang. Laki-laki 201.755 orang. Perempuan 200.540 orang.</p> <p>Yang sudah mengikuti pelatihan/sosialisasi 5.295 orang. Laki-laki 3.945 orang. Perempuan 1.350 orang.</p> <p>Jumlah anggota Team Reaksi Cepat sebanyak 35 orang.</p> <p>Data korban bencana 6.988 orang</p> <p>Jumlah penduduk di daerah rawan bencana 345.187 orang.</p> <p>Luas wilayah Kab. Solok 3.736 km<sup>2</sup>. Luas wilayah rawan bencana 2.487 km<sup>2</sup>.</p>	<p><b>Isu Gender:</b> Masih kurangnya informasi kebencanaan di masyarakat</p> <p><b>Faktor Kesenjangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya pengetahuan perempuan tentang informasi kebencanaan.</li> <li>Masih kurangnya sarana prasarana peralatan kebencanaan.</li> <li>Masih kurangnya koordinasi dengan OPD instansi terkait.</li> <li>Masih kurangnya Sumber Daya (SDM) Manusia Tim Reaksi Cepat (TRC)</li> <li>masih kurangnya peran wanita dalam evakuasi bencana</li> </ul> <p><b>Kontrol:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya dukungan keluarga.</li> <li>Belum optimalnya pengawasan terhadap daerah rawan bencana.</li> </ul> <p><b>Manfaat:</b></p>	<p><b>Sebab Kesenjangan Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya sosialisasi tentang kebencanaan.</li> <li>Sarana prasarana peralatan kebencanaan yang belum memadai.</li> <li>Kurangnya koordinasi dengan OPD terkait dan lintas sektoral.</li> <li>Sumber Daya Manusia (SDM) Tim Reaksi Cepat (TRC) yang belum memadai.</li> </ul>	<p><b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya kepedulian masyarakat tentang kebencanaan.</li> <li>Masih enggan masyarakat khususnya wanita apabila ditolong oleh laki-laki evakuasi bencana</li> </ul>	<p><b>Reformulasi Tujuan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Pengetahuan Seluruh Masyarakat tentang Kebencanaan</li> <li>Kaum wanita punya kemampuan dalam membantu dim evakuasi bencana</li> <li>di dapat memberikan informasi bencana kepada masyarakat khususnya perempuan dan lansia</li> </ul>	<p><b>Rencana Aksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi/pelatihan informasi tentang kebencanaan.</li> <li>2. Pengadaan sarana prasarana peralatan kebencanaan.</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dan lintas sektoral.</li> <li>4. Peningkatan kapasitas SDM TRC.</li> <li>5. Memberikan sosialisasi, pelatihan kebencanaan, kepada masyarakat.</li> <li>6. Mengupayakan gender sebagai ujung tombak dim memberikan pelayanan informasi rawan bencana kpd masyarakat</li> </ul>	<p><b>Basis Line</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah warga masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan/sosialisasi 5.295( Data Renstra 2016-2021) orang.</li> <li>Jumlah gender yg telah diberikan sosialisasi informasi rawan bencana sbdk 70 org</li> </ul>	<p><b>Indikator Kinerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Komunikasi dan Edukasi Raw Bencana Kab/Kota sebanyak 100 orang.</li> <li>Sasaran : Input : Rp.308.510.200,- GBS : Rp. 15.000.000,-</li> <li>Output: Tersaksama Sosialisasi/pelatihan informasi kebencanaan</li> <li>Outcome: Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat tentang struktur tenaga instruktur kebencanaan.</li> </ul>

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SOLOK

  
 NIP. 19740117 19931 1 001

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
( GENDER BUDGET STATEMENT )**

**SKPD** : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok  
**ALAMAT** : Jln.Raya Koto Baru  
**TAHUN** : 2023  
**ANGGARAN**

<b>PROGRAM</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>
<b>KODE PROGRAM</b>	<b>1.05.03</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>
<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota ( Per Jenis Bencana)</b>
<b>HASIL/OUTPUT</b>	<b>Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan informasi rawan bencana</b>

**ANALISIS  
SITUASI**

**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana
- Jumlah Penduduk Kabupaten Solok 402.295 orang
  - Laki-laki sebanyak 201.755 orang
  - Perempuan sebanyak 200.540 Orang
- Data korban bencana 911 orang
  - Laki-laki sebanyak 499 orang
    - Anak-anak sebanyak 425 orang
    - Dewasa sebanyak 74 orang
  - Perempuan sebanyak 412 orang
    - Anak-anak sebanyak 336 orang
    - Dewasa sebanyak 74 orang
- Jumlah penduduk di daerah rawan bencana 393.890
- Luas wilayah Kabupaten Solok 3.738 KM<sup>2</sup>
- Luas wilayah rawan bencana 3.738 KM<sup>2</sup>

**2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender**

**Akses :**

Masih kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya perempuan dlm layanan informasi rawan bencana

**Partisipasi :**

Masih kurangnya peran perempuan dlm layanan informasi rawan bencana

**Kontrol :**

Kurangnya dukungan keluarga

**Manfaat :**

Masyarakat akan sadar terhadap bahaya dan dampak dari bencana

**a. Penyebab Internal :**

1. Masih kurangnya sosialisasi tentang kebencanaan
2. Sumber Data Manusia (SDM) Tim Reaksi Cepat (TRC) yang belum memadai

**b. Penyebab Eksternal :**

1. Kurangnya kepedulian serta kesadaran masyarakat tentang kebencanaan
2. Masih enggan masyarakat khususnya perempuan dalam memberikan informasi rawan bencana

<b>PERENCANAAN KEGIATAN</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Pengembangan kapasitas TRC</b>
		<b>Aktifitas</b>	<b>1. Peningkatan SDM ( kualitas dan kuantitas ) dalam wawasan kebencanaan terhadap Perempuan</b>
		<b>Sumber Daya ( Out Put )</b>	<b>Dana : Rp. 308.510.200 Dana GAB GBS : 15.000.000 Panitia : BPBD</b>
			<b>Peserta : KSB Nagari (ada unsur perempuan ) dan TRC BPBD</b>
			<b>Saran Prasarana : ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak dan Bahan Komputer.</b>
		<b>Out Come</b>	<b>Rumusan kinerja</b> Terdapat kekurangan personil dalam melakukan sosialisasi rawan bencana dan evakuasi korban bencana yang mayoritas dari kejadian tersebut dalam perempuan .  <b>Indikator Kinerja</b> Terbatasnya jumlah personil Tim Reaksi Cepat yang sebelumnya 10 orang diusahakan menjadi 15 orang
		 <p><b>Kepala Pelaksana</b> <b>ARMEN, AP.MM</b> <b>Nip. 19740207 199311 1 001</b></p>	

## Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 PROGRAM : PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	ISU GENDER		KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN	Rencana Aksi	Basis Data (base line)	Indikator Kinerja
			Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal				
<b>Program :</b> PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah masyarakat yang melakukan pelayanan administrasi kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 270 orang/hari, terdiri dari :  1. 150 orang yang melakukan pelayanan langsung ke Disdukcapil  2. 120 Orang yang melakukan pelayanan secara online	<b>Akses :</b> Luasnya wilayah Kabupaten Solok yang terdiri dari 74 Nagari dimana sebagian besar nagari terletak di lokasi yang jauh dari Pusat layanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan jumlah masyarakat dan dokumen yang akan di proses  Sarana dan prasarana penunjang yang tersedia masih kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan	Memberikan kenyamanan kepada Seluruh lapisan Masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan baik secara online maupun pelayanan langsung	Perlu diadakan sosialisasi mengenai tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online kepada seluruh lapisan masyarakat untuk 74 Nagari	Jumlah nagari di Kabupaten Solok 74 nagari yang sebagian besar wilayahnya jauh dari pusat pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Arosuka.	1. Sosialisasi mengenai tata cara pengurusan dokumen kependudukan online untuk Kecamatan
Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk  Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rata-rata jumlah dokumen yang diterbitkan setiap bulannya adalah 10.312 dokumen	Terdapat beberapa wilayah yang susah akses internet seperti : Nagari pasilihan, Nagari Sariak alahan tiga, Nagari garabak data, Nagari Sumiso, Nagari Aia Batumbuk, Nagari Aia Iuo, Nagari sungai abu	Kurangnya SDM dari segi kualitas dan kuantitas yang dapat memberikan pelayanan maksimal ke seluruh lapisan masyarakat	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang lengkap demi kenyamanan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan	Melakukan pelayanan langsung jemput bola ke nagari-nagari atau kecamatan di seluruh wilayah Kab. Solok	Jumlah pelayanan yang dilakukan setiap hari sebanyak 270 orang dengan total dokumen kurang lebih 810 dokumen per hari	Output : Terlaksananya sosialisasi mengenai tata cara pengurusan kependudukan online untuk kecamatan di

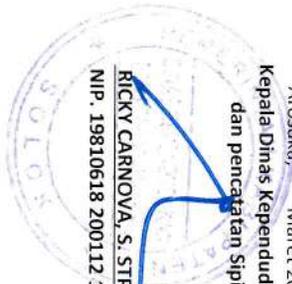
LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (base line)	Indikator
<p><b>Tujuan :</b></p> <p>Tersedianya kemudahan dan kenyamanan bagi semua lapisan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan baik secara online maupun pelayanan langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	<p>Untuk pengurusan administrasi secara langsung didominasi oleh perempuan sekitar 70 % ( 105 orang). Dan laki-laki 30 % ( 45 orang)</p> <p>Jumlah dokumen kependudukan yang di proses setiap hari lebih kurang 450 dokumen/ hari</p> <p>Jumlah loket dan petugas pelayanan terdiri dari : Front office 3 orang</p> <p>loket pelayanan offline 5 loket ( 4 loket umum, 1 loket khusus untuk kelompok rentan )</p> <p>loket pelayanan Online 3 loket</p> <p>Petugas verifikasi dokumen online dan offline 6 orang</p> <p>Luasnya wilayah Kabupaten solok yang terdiri dari 74 Nagari dimana sebagian besar nagari terletak dilokasi yang jauh dari Pusat layanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>	<p>sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang representatif untuk menunjang pelayanan Publik</p> <p>Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan fasilitas kependudukan secara online sehingga masih terdapat penumpukan antrian di loket pelayanan langsung Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>	<p>Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektor</p>	<p>Banyaknya nagari yang lokasinya jauh dari pusat layanan disdukcapil Kab. Solok</p>	<p>KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN</p>	<p>Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan memenuhi standar pelayanan publik</p> <p>Meningkatkan kompetensi SDM melalui Bimtek tentang standar pelayanan Publik</p> <p>Perlu adanya penambahan jumlah SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang menunjang kelancaran pelayanan Publik</p>	<p>Jumlah operator pelayanan 3 orang operator online, 5 orang operator offline</p>	<p>Outcome : meningkatkan pelayanan kependudukan sehingga masyarakat dapat antri pelayanan o</p> <p>2 Melakukan 1 langsung per nagari-nagari kecamatan e wilayah Kab (SIPARLA)</p> <p>Input : 1.85.000.000</p> <p><b>Output :</b> Tertaksananya pelayanan la Nagari-nagari menggunakan pelayanan di</p>
		<p><b>Kontrol :</b> Kurangnya perhatian para pengambil kebijakan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik terutama menyangkut pengarusutamaan gender</p>				<p>Perlu dilaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait</p>		

LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
		ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN	PENGUKURAN HASIL	
Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (base line)	Indikator Kinerja
<p>Terdapat beberapa wilayah yang susah akses internet seperti : Nagari pasilhan, Nagari Sariak alahan tigo, Nagari garabak data, Nagari Sumiso, Nagari Aia Batumbuk, Nagari Aia Luo, Nagari sungai abu</p> <p>Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik</p> <p>Permendagri No. 19 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik</p>	<p><b>Manfaat :</b> Seluruh lapisan masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukan dari rumah tanpa harus datang ke disdukcapil Kab. Solok dan tidak mengganggu aktifitas harianya tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama dan lebih hemat dari segi waktu dan biaya</p>						<p>Outcome : meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan</p>
	<p>2 Meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil</p>						<p>3</p> <p>Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan memenuhi standar pelayanan publik</p> <p>Input : Rp. 200.000.000,-</p> <p>Output : Tersedianya sarana dan prasarana lengkap yang memenuhi standar pelayanan publik</p>
							<p>4</p> <p>Meningkatkan kompetensi SDM melalui Bimtek tentang standar pelayanan Publik</p> <p>Outcome : Terciptanya kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pengurusan administrasi kependudukan</p>

LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (base line)	Indikator Kinerja
		ISU GENDER					
							Input : Rp. 15.000.000,- Output : Terlaksananya Bimbingan teknis peningkatan kompetensi SDM untuk pelayanan publik Outcome : meningkatkan kualitas pelayanan disdukcapi

Arosuka, Maret 2023  
 Kepala Dinas Kependudukan  
 dan Pencatatan Sipil,

RICKY CARNOVA, S. STP, MM  
 NIP. 19810618 200112 1 002



**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
( GENDER BUDGET STATEMENT)**

<b>SKPD</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok</b>
<b>ALAMAT</b>	Arosuka
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	2024
<b>PROGRAM</b>	PENDAFTARAN PENDUDUK
<b>KODE PROGRAM</b>	2.12.02.
<b>KEGIATAN</b>	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
<b>SUB KEGIATAN</b>	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
<b>HASIL/OUTPUT</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terlaksananya Sosialisasi mengenai tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online untuk 14 Kecamatan</li><li>2. Terlaksananya pelayanan langsung di Nagari-nagari dengan menggunakan mobil pelayanan disdukcapil</li><li>3. Tersedianya sarana dan prasana lengkap yang memenuhi standar pelayanan publik</li><li>4. Terlaksananya Bimbingan teknis peningkatan kompetensi SDM untuk pelayanan publik</li></ol>
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Jumlah masyarakat yang melakukan pelayanan administrasi kependudukan 270 orang per hari terdiri dari 150 orang pelayanan langsung, 120 orang pelayanan online.</li><li>2. Jumlah yang melakukan pelayanan langsung 150 orang / hari terdiri dari Perempuan 105 orang dan laki-laki 45 orang.</li><li>3. Jumlah loket pelayanan langsung 5 loket, semuanya petugas perempuan.</li><li>4. Jumlah loket online 3 loket dan semua petugasnya laki-laki.</li></ol> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p><b>Akses :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luasnya wilayah Kabupaten Solok yang terdiri dari 74 Nagari dimana sebagian besar nagari terletak dilokasi yang jauh dari Pusat layanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.</li><li>- Terdapat beberapa wilayah yang tidak terjangkau akses internet.</li><li>- Sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang representatif dalam menunjang pelayanan Publik.</li></ul> <p><b>Partisipasi :</b></p> <p>Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan fasilitas pengurusan administrasi kependudukan secara online sehingga masih terdapat penumpukan antrian di loket pelayanan langsung Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Solok</p> <p><b>Kontrol :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya perhatian para pengambil kebijakan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik terutama menyangkut pengarusutamaan gender</li></ul>

**Manfaat :**

- Seluruh lapisan masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukan dari rumah tanpa harus datang ke disdukcapil Kab. Solok dan tidak mengganggu aktifitas hariannya tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama dan lebih hemat dari segi waktu dan biaya
- Meningkatnya kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil

**a. Penyebab Internal :**

1. Jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan jumlah masyarakat dan dokumen yang akan di proses.
2. Sarana dan prasarana penunjang yang tersedia masih kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
3. Kurangnya SDM dari segi kualitas dan kuantitas yang dapat memberikan pelayanan maksimal ke seluruh lapisan masyarakat.

**b. Penyebab Eksternal :**

1. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen administrasi kependudukan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online.
3. Banyaknya nagari yang lokasinya jauh dari pusat layanan disdukcapil Kab. Solok.

<b>PERENCANAAN KEGIATAN</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Tujuan</b>	Tersedianya kemudahan dan kenyamanan bagi semua lapisan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan baik secara online maupun pelayanan langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		<b>Aktifitas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi mengenai tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online kepada seluruh lapisan masyarakat untuk 74 Nagari</li> <li>- Melakukan pelayanan langsung jemput bola ke nagari-nagari atau kecamatan di seluruh wilayah Kab. Solok ( SIJARLA)</li> <li>- Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang lengkap demi kenyamanan seluruh lapisan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan</li> <li>- Meningkatkan kompetensi SDM melalui Bimtek tentang standar pelayanan Publik</li> </ul>
		<b>Sumber Daya ( Out Put )</b>	Dana : Rp. 703.000.000,-
			Panitia : DISDUKCAPIL
			Peserta : Perangkat Nagari, Perwakilan Masyarakat, Camat, Kepala OPD, KUA, Puskesmas, dan Pengadilan Agama

			<p>Sarana Prasarana : ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak dan Bahan Komputer, Konsumsi, Honor narasumber. Sarana Prasarana : ruang tunggu, area parkir, area bermain anak, toilet, dan ruang laktasi.</p>
		<p><b>Out Come</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rumusan kinerja</b></li> <li>- Meningkatnya jumlah pelayanan secara online sehingga mengurangi daftar antrian di loket pelayanan offline</li> <li>- meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan</li> <li>- Terciptanya kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pengurusan administrasi kependudukan ( Indeks Kepuasan Masyarakat)</li> <li>- meningkatnya kualitas pelayanan disudkcapil ( Indeks Kepuasan Masyarakat)</li> </ul> <p><b>Indikator Kinerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah penduduk yang memanfaatkan pelayanan online meningkat sebanyak 20%</li> <li>- Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap demi menunjang kenyamanan penduduk dalam melakukan pengurusan admnistrasi kependudukan di pusat layanan</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Solok</b></p> <div style="text-align: center;">  <p><b><u>RICKY CARNOVA, S. STP, MM</u></b>  <b>Nip. 19810618 200112 1 002</b></p> </div>		

## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DINAS PERTANIAN TAHUN 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>Program</b> Penyuluhan Pertanian Kegiatan: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	<b>Data</b> Pembuka Wawasan Jumlah Penyuluh Pertanian : 84 orang	<b>Faktor</b> Kesenjangan Faktor Kesenjangan: 1. Aspek Akses:- 2. Aspek partisipasi: Pada pertemuan kelompok tani lebih banyak laki-laki (70%) dibandingkan perempuan (30%) 3. Aspek kontrol: Anggota kelompok perempuan lebih banyak dari laki-laki	<b>Isu Gender</b> Sebab Kesenjangan Internal 1. Masih rendahnya kapasitas SDM (Penyuluh Pertanian dan petani) untuk mengadopsi inovasi teknologi pertanian 2. Masih kurangnya sosialisasi dengan kelompok petani 3. Masih kurangnya sarana penyuluhan 4. Masih kurangnya	<b>Sebab</b> Kesenjangan Eksternal 1. Laki-laki sebagai pengambil kebijakan dalam rumah tangga yang menentukan teknologi yang akan diterapkan dalam usaha tani sehingga laki-laki yang lebih banyak mengikuti pelatihan. 2. Perempuan sebagai petani juga sebagai ibu rumah tangga	<b>Reformulasi</b> Tujuan Reformulasi tujuan Meningkatkan pengetahuan petugas dan petani tentang penerapan inovasi teknologi pertanian.	<b>Rencana Aksi</b> 1. Meningkatkan kapasitas SDM penyuluh dengan mengikuti bimtek/worksho p/pelatihan 2. Melaksanakan pelatihan Tematik bagi kelompok tani dengan komposisi peserta laki-laki dan perempuan 60 : 40) 3. Meningkatkan sosialisasi dengan kelompok tani	<b>Data Dasar (Baseline)</b> Jumlah petani yang yang tergabung dalam kelompok tani Laki-laki = 18.090 orang Perempuan = 19.495 orang	<b>Indikator Kinerja</b> Output 1. Jumlah bahan prekek tematik pertanian yang disediakan sebanyak 14 paket dengan anggaran: Rp. 9.100.000,- 2. Jumlah petani yang mengikuti pelatihan tematik (140 orang) dengan anggaran Rp. 70.000.000,- 3. Jumlah leaflet/brosur yang disediakan sebanyak 500 lembar dengan anggaran Rp. 2.500.000,- Outcome Meningkatkan cakupan kelompok tani yang produktif

Penyuluh Pertanian Kelompok tani	SK Penetapan Kelompok tani	4. Aspek manfaat: Manfaat pelatihan tematik lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh Laki-Laki	sarana media informasi	sehingga kurang berminat untuk mengikuti pelatihan	4. Meningkatkan sarana penyuluhan	5. Meningkatkan penyediaan media informasi	
--	-------------------------------------	--	---------------------------	---	---	--	--

Arosuka,      Maret 2023

Kepala Dinas Pertanian,  
Kabupaten Sokoloh

  
Dita Kenedy Hamzah, M.Si  
NIP. 19650727 199202 1 002

Paraf Hiasan	Paraf	Tanggal
Samban		17/4/23
Rosen pub	Ah	17/4/23

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

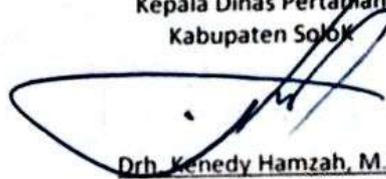
**SKPD** : (Dinas Pertanian)  
**TAHUN** : (2024)  
**ANGGARAN**

<b>PROGRAM</b>	(Program Penyuluhan Pertanian)		
<b>KODE PROGRAM</b>	3.27.07		
<b>KEGIATAN</b>	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian		
<b>SUB KEGIATAN</b>	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Pagu Anggaran : Rp. 79.350.000,-		
<b>HASIL/OUTPUT</b>	1.		
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p>1. Data Pembuka Wawasan          Jumlah Penyuluh Pertanian : 84 orang          Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani          Laki-laki= 18.090 orang          Perempuan= 19.495 orang          Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari laki-laki          SK Penetapan Kelompok Tani</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>A. Faktor Kesenjangan</p> <p>a. Aspek Akses:-</p> <p>b. Aspek partisipasi: Pada pertemuan kelompok tani lebih banyak Laki-Laki dibandingkan perempuan.</p> <p>c. Aspek kontrol:          Anggota kelompok tani lebih didominasi oleh perempuan</p> <p>B. Aspek manfaat: Manfaat pelatihan tematik pada saat ini lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh Petani laki-laki</p> <p>C. Penyebab Internal</p> <p>a. Masih rendahnya kapasitas SDM (Penyuluh Pertanian)</p> <p>b. Masih kurangnya sosialisasi dengan kelompok tani.</p> <p>c. Masih kurangnya sarana untuk desiminasi inovasi teknologi pertanian</p> <p>d. Masih kurangnya media sarana informasi</p> <p>D. Penyebab Eksternal:</p> <p>a. Laki-laki sebagai pengambil kebijakan dalam rumah tangga yang menentukan teknologi yang akan diterapkan dalam usaha tani sehingga laki-laki yang lebih banyak mengikuti pelatihan</p> <p>b. Perempuan sebagai petani juga sebagai ibu rumah tangga sehingga kurang berminat untuk mengikuti pelatihan</p>		
<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Komponen 1</b>	(Diambil dari GAP langkah 7)	
		<b>Tujuan</b>	Meningkatnya pengetahuan petugas dan petani tentang penerapan inovasi teknologi pertanian.
	<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp.70.000.000,-	
	<b>Komponen 2</b>	<b>Tujuan</b>	Meningkatkan sarana untuk desiminasi inovasi teknologi pertanian

		<b>Alokasi anggaran</b>	Rp. 9.100.000,-
	<b>Komponen 3</b>	(Diambil dari GAP langkah 7)	
		<b>Tujuan</b>	Meningkatkan penyediaan media informasi
		<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 2.500.000,-
	<b>Total anggaran</b>		Rp. 81.600.000,-
<b>CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)</b>	<p>Output dan dampak kegiatan yang memperlihatkan perbaikan kearah KKG (Diambil dari GAP langkah 9 )</p> <p>Output</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah bahan praktek tematik pertanian yang disediakan sebanyak 14 paket</li> <li>2. Jumlah petani yang mengikuti pelatihan tematik sebanyak 140 orang</li> <li>3. Jumlah leaflet/brosur yang disediakan sebanyak 500 lembar</li> </ol> <p>Outcome</p> <p><b>Meningkatnya cakupan kelompok tani yang produktif</b></p>		

Arosuka, Maret 2023

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Solok



Drh. Kenedy Hamzah, M.Si  
NIP. 19650727 199202 1 002

Paraf Horarki		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris		12/3-2023
Kesatuan red	4j	12/3-2023

Rekap kelompok tani per wilayah  
Provinsi Sumatera Barat  
Kabupaten Solok  
Per 16-03-2023

No	Kecamatan	Jumlah Poktan	Jumlah Anggota (Laki-Laki)	Jumlah Anggota (Perempuan)	Jumlah Anggota (Belum diisi jenis ketamihnya)	Total Anggota	Jumlah Anggota Sudah diisi NIK	Jumlah anggota memiliki lahan kurang dari 1 ha	Jumlah anggota memiliki lahan kurang dari 1-2 ha	Jumlah anggota memiliki lahan lebih dari 2 ha
1	BUKIT SUNDI	114	1.224	2.296	1	3521	3521	3035	485	1
2	DANAU KEMBAR	90	1.065	557	0	1622	1622	146	1423	53
3	GUNUNG TALANG	213	2.499	2.391	2	4893	4893	2713	2180	0
4	HILIRAN GUMANTI	142	2.040	1.556	2	3598	3598	3276	309	13
5	IX KOTO SUNGAI LASI	81	672	730	0	1402	1402	980	395	27
6	JUNJUNG SIRIH	48	509	651	29	1189	1189	456	732	1
7	KUBUNG	210	1.509	2.858	0	4367	4367	2943	1421	3
8	LEMBAH GUMANTI	135	1.587	418	0	2124	2124	1374	585	165
9	LEMBANG JAYA	142	1.390	2.079	0	3469	3469	2793	660	16
10	PANTAI CERMIN	96	1.093	926	0	2019	2019	1363	641	15
11	PAYUNG SEKAKI	72	503	883	0	1386	1386	745	628	13
12	TIGO LUBAH	89	828	879	0	1707	1707	312	1326	69
13	X KOTO DIATAS	122	1.593	1.475	1	3095	3095	3015	80	0
14	X KOTO SINGKARAK	127	1.578	1.796	0	3374	3374	2021	1351	2
	<b>Jumlah</b>	<b>1.681</b>	<b>18.090</b>	<b>19.495</b>	<b>35</b>	<b>37.766</b>	<b>37.766</b>	<b>25.172</b>	<b>12.216</b>	<b>378</b>

**GENDER BUDGET STATEMEN (GBS)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK  
TAHUN 2024**

ASPEK	URAIAN
Program	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kode Program	Kode Rekening : 1.02.02.2.01
Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota.
Analisis Situasi	<p>Capaian SPM Bidang Kesehatan pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir dan Balita belum mencapai 100%, dengan rincian sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan kesehatan pada ibu hamil (86.7% Tahun 2019, 81.1 % Tahun 2020 dan 84,40% Tahun 2021, 97.04% pada tahun 2022)</li> <li>• Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin ( 87.5% Tahun 2019, 81.9% Tahun 2020 dan 89.20 % Tahun 2021, 92.61% pada tahun 2022)</li> <li>• Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir (Tahun 2020, 84.64% Tahun 2021, 88.34%. Tahun 2022, 91.59% )</li> <li>• Pelayanan kesehatan pada balita ( 79.2% Tahun 2020, 97.67% Tahun 2021 dan Tahun 2022, 100%</li> </ul> <p>Ketersediaan tenaga kesehatan yang belum sesuai standar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio Tenaga Kesehatan dengan Penduduk Kab. Solok (Dokter 1 : 69.835, Bidan 1 : 798, perawat 1 : 1.426</li> </ul> <p>Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan belum sesuai standar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio Fasyankes dengan jumlah penduduk Kab. Solok Puskesmas 1 : 19.671, Pustu 1 : 4.449, Polindes 1 : 1.369</li> </ul> <p>Masih terdapat dukun aktif sebanyak 83 orang</p> <p>Isu Dan Kesenjangan Gender:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Faktor Kesenjangan</b> <p><b>Akses</b> : Masih kurangnya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat di daerah terpencil karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan transportasi (keadaan geografis)</p> <p><b>Partisipasi</b> : Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak (pemeriksaan kesehatan secara berkala, persalinan di sarana fasyankes dan deteksi dini resiko tinggi)</p> <p><b>Kontrol</b> : Masih rendahnya deteksi dini resiko tinggi dan kurangnya pengawasan atau pendampingan komplikasi di lapangan</p> <p><b>Manfaat</b> : Peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak dapat menurunkan AKI dan AKB di Kab. Solok</p> </li> <li>• <b>Kesenjangan Interna</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penempatan tenaga strategis (dokter dan bidan) yang belum merata terutama di daerah terpencil.</li> <li>✓ Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan terutama dokter, bidan dan perawat (Belum memenuhi standar)</li> <li>✓ Keterbatasan sarana, prasarana dalam memberikan pelayanan esensial kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)</li> <li>✓ Pelayanan kesehatan pada ibu dan bayi dan balita belum sesuai standar</li> <li>✓ Masih kurangnya jumlah Puskesmas dan Pustu di Kab. Solok apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk</li> <li>✓ Kompetensi tenaga kesehatan (Dokter, Bidan dan Perawat) yang masih kurang terutama tentang Penanganan Obstetri Neonatal Dasar)</li> </ul> </li> <li>• <b>Kesenjangan Eksternal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Budaya yang masih susah untuk di rubah tentang perlunya melakukan pemeriksaan kehamilan dan persalinan di fasyankes sehingga terjadi 3T (Terlambat mengambil keputusan, Terlambat sampai ke fasilitas dan Terlambat Mendapat Penanganan)</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan terutama kesehatan ibu sehingga terdapat 4T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat dan Terlalu Banyak)</li> <li>✓ Masih terdapatnya ibu hamil/bersalin yg tdk mampu yang belum memiliki jaminan Kesehatan</li> <li>✓ Masih terdapatnya dukun yang aktif terutama di daerah tepencil</li> <li>✓ Sarana transportasi masih terbatas</li> <li>✓ Akses jalan yang rusak sehingga sulit dilalui sehingga akses ke fasyankes terbatas</li> </ul>														
Capaian Program	<p>1. Tolak Ukur : Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Bayi</p> <p>2. Indikator dan target Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar</li> <li>• Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar</li> <li>• Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar</li> <li>• Persentase pelayanan kesehatan pada balita sesuai standar</li> <li>• Persentase fasyankes yang memiliki tenaga sesuai standar</li> <li>• Persentase fasyankes sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar</li> </ul>														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	<b>Rp. 3.907.081.358,-</b>														
Rencana Aksi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Komponen input 1</td> <td>Pelayanan Kesehatan Pada Ibu hamil Sesuai Standar Input: Rp. 142.170.000 Output: Presentase Pelayanan Kesehatan Pada Ibu hamil Sesuai Standar Outcome: Angka Kematian Ibu</td> </tr> <tr> <td>Komponen input 2</td> <td>Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Bersalin Sesuai Standar Input: Rp. 73.214.748 Output: Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Ibu bersalin sesuai standar Outcome: Angka Kematian Ibu</td> </tr> <tr> <td>Komponen Input 3</td> <td>Pelayanan Kesehatan Pada Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Input: Rp. 149.742.000 Output: Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Bayi Baru Lahir sesuai standar Outcome: Angka Kematian Bayi</td> </tr> <tr> <td>Komponen Input 4</td> <td>Pelayanan Kesehatan Pada Balita Sesuai Standar Input: Rp. 151.680.000 Output: Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Balita sesuai standar Outcome: Angka Kematian Bayi</td> </tr> <tr> <td>Komponen Input 5</td> <td>Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan Input: Rp. 140.000.000 Output: Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan Outcome: Fasyankes memiliki tenaga kesehatan sesuai standar</td> </tr> <tr> <td>Komponen Input 6</td> <td>Promosi kesehatan di semua tatanan Input: Rp. 750.274.610 Output: Jumlah Media promosi yang tersedia Outcome: Keluarga Ber PHBS</td> </tr> <tr> <td>Komponen Input 7</td> <td>Pengadaan sarana dan prasarana dan alat kesehatan Input: Rp. 2.500.000.000 Output: Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia Outcome: Persentase fasyankes yang memiliki sarana, prasarana dan alkes sesuai standar</td> </tr> </table>	Komponen input 1	Pelayanan Kesehatan Pada Ibu hamil Sesuai Standar Input: Rp. 142.170.000 Output: Presentase Pelayanan Kesehatan Pada Ibu hamil Sesuai Standar Outcome: Angka Kematian Ibu	Komponen input 2	Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Bersalin Sesuai Standar Input: Rp. 73.214.748 Output: Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Ibu bersalin sesuai standar Outcome: Angka Kematian Ibu	Komponen Input 3	Pelayanan Kesehatan Pada Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Input: Rp. 149.742.000 Output: Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Bayi Baru Lahir sesuai standar Outcome: Angka Kematian Bayi	Komponen Input 4	Pelayanan Kesehatan Pada Balita Sesuai Standar Input: Rp. 151.680.000 Output: Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Balita sesuai standar Outcome: Angka Kematian Bayi	Komponen Input 5	Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan Input: Rp. 140.000.000 Output: Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan Outcome: Fasyankes memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	Komponen Input 6	Promosi kesehatan di semua tatanan Input: Rp. 750.274.610 Output: Jumlah Media promosi yang tersedia Outcome: Keluarga Ber PHBS	Komponen Input 7	Pengadaan sarana dan prasarana dan alat kesehatan Input: Rp. 2.500.000.000 Output: Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia Outcome: Persentase fasyankes yang memiliki sarana, prasarana dan alkes sesuai standar
Komponen input 1	Pelayanan Kesehatan Pada Ibu hamil Sesuai Standar Input: Rp. 142.170.000 Output: Presentase Pelayanan Kesehatan Pada Ibu hamil Sesuai Standar Outcome: Angka Kematian Ibu														
Komponen input 2	Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Bersalin Sesuai Standar Input: Rp. 73.214.748 Output: Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Ibu bersalin sesuai standar Outcome: Angka Kematian Ibu														
Komponen Input 3	Pelayanan Kesehatan Pada Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Input: Rp. 149.742.000 Output: Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Bayi Baru Lahir sesuai standar Outcome: Angka Kematian Bayi														
Komponen Input 4	Pelayanan Kesehatan Pada Balita Sesuai Standar Input: Rp. 151.680.000 Output: Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Balita sesuai standar Outcome: Angka Kematian Bayi														
Komponen Input 5	Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan Input: Rp. 140.000.000 Output: Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan Outcome: Fasyankes memiliki tenaga kesehatan sesuai standar														
Komponen Input 6	Promosi kesehatan di semua tatanan Input: Rp. 750.274.610 Output: Jumlah Media promosi yang tersedia Outcome: Keluarga Ber PHBS														
Komponen Input 7	Pengadaan sarana dan prasarana dan alat kesehatan Input: Rp. 2.500.000.000 Output: Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia Outcome: Persentase fasyankes yang memiliki sarana, prasarana dan alkes sesuai standar														

Arosuka, Maret 2023  
Kepala Dinas Kesehatan Kab.Solok

**ZULMENDRI, SKM, M. Kes**  
NIP. 19660604 198703 1 005

TIM DRIVER PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER  
KABUPATEN SOLOK

Mengetahui:	Tanda Tangan
	<p>1.....</p> <p>2.....</p> <p>1. ....</p> <p>2. ....</p>

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK**  
**TAHUN 2024**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender: Masih tingginya angka kematian Ibu			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Kinerja
<p><b>Program:</b> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Tujuan : Meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak</p> <p>Sasaran : Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir dan Balita</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Permendagri 59 tahun 2021, PMK Nomor 4 Tahun 2019 Tentang SPM Pelayanan Kesehatan (Capaian SPM pada ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita 100 %)</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan (Dokter 1 : 2.500 Bidan 1 : 1.000 dan Perawat 1 : 855</li> </ul>	<p><b>Akses :</b> Masih kurangnya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat di daerah terpencil karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan transportasi (keadaan geografis)</p> <p><b>Partisipasi:</b> Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak (pemeriksaan kesehatan secara berkala, persalinan di</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penempatan tenaga strategis (dokter dan bidan) yang belum merata terutama di daerah terpencil.</li> <li>Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan terutama dokter, bidan dan perawat (Belum memenuhi standar)</li> <li>Keterbatasan sarana, prasarana dalam memberikan pelayanan esensial kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)</li> <li>Pelayanan kesehatan pada ibu dan bayi dan balita belum sesuai standar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budaya yang masih susah untuk di rubah tentang perlunya melakukan pemeriksaan kehamilan dan persalinan di fasyankes sehingga terjadi 3T (Terlambat mengambil keputusan, Terlambat sampai ke fasilitas dan Terlambat Mendapat Penanganan)</li> <li>Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan terutama kesehatan ibu sehingga terdapat 4T (Terlalu Muda, Terlalu Tua,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 210/100.000 KH menjadi 205/100.000 KH</li> <li>Menurunkan Angka Kematian Bayi 8.56 / 1.000 KH menjadi 8.35/1.000 KH</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan analisa terhadap anjab dan ABK serta peta jabatan terhadap tenaga kesehatan</li> <li>Koordinasi dengan lintas sektor terkait pemenuhan SDMK (Membuat usulan kebutuhan SDMK)</li> <li>Pengadaan sarana, prasarana dan alat kesehatan baik melalui APBD dan DAK</li> <li>Melaksanakan pelayanan kesehatan kepada</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan kesehatan pada ibu hamil (81.1 % Tahun 2020 dan 84,41% Tahun 2021, 97,04% Tahun 2022)</li> <li>Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin (Tahun 2020 81.9% Tahun 2021 dan 89.21% Tahun 2022, 92,61%</li> <li>Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir (Tahun 2020, 84.64% Tahun 2021, 88.34% dan Tahun 2022, 91.59%</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Kesehatan Pada Ibu hamil Sesuai Standar Input: Rp. 142.170.000 Output: Presentase Pelayanan Kesehatan Pada Ibu hamil Sesuai Standar Outcome: Angka Kematian Ibu</li> <li>Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Bersalin Sesuai Standar Input: Rp. 73.214.748 Output: Presentase Pelayanan Kesehatan Pada Ibu bersalin sesuai standar Outcome: Angka Kematian Ibu</li> <li>Pelayanan Kesehatan Pada Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Input: Rp. 149.742.000 Output: Presentase Pelayanan Kesehatan</li> </ol>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas (Puskesmas 1 : 16.000, Pustu 1 : 1.500, Poskesri 1 : 1.000)</li> <li>• Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 tentang pelayanan Kesehatan kehamilan, Melahirkan, Kontrasepsi dan Seksual</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil minimal 6 (enam) kali selama ibu hamil (2.1.3) dan dengan pemeriksaan oleh dokter sebanyak 2 (dua) kali pada kunjungan 1 dan ke 5</li> <li>2. Pertolongan persalinan harus minimal 6</li> </ol>	<p>sarana fasyankes dan deteksi dini resiko tinggi)</p> <p><b>Kontrol:</b> Masih rendahnya deteksi dini resiko tinggi dan kurangnya pengawasan atau pendampingan komplikasi di lapangan</p> <p><b>Manfaat :</b> Peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak dapat menurunkan AKI dan AKB di Kab. Solok</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya jumlah Puskesmas dan Pustu di Kab. Solok apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk</li> <li>• Kompetensi tenaga kesehatan (Dokter, Bidan dan Perawat) yang masih kurang terutama tentang Penanganan Obstetri Neonatal Dasar)</li> </ul>	<p>Terlalu Dekat dan Terlalu Banyak)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terdapatnya ibu hamil/bersalin yg tdk mampu yang belum memiliki jaminan Kesehatan</li> <li>• Masih terdapatnya dukun yang aktif terutama di daerah tepencil</li> <li>• Sarana transportasi masih terbatas</li> <li>• Akses jalan yang rusak sehingga sulit dilalui sehingga akses ke fasyankes terbatas</li> </ul>		<p>ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita sesuai standar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peningkatan upaya promosi kesehatan di semua tatanan</li> <li>6. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan (Dokter, Bidan dan Perawat) tentang Penangan Obstetri Neonatal Dasar)</li> <li>7. Pembinaan kemitraan bidan dan dukun bersalin</li> <li>8. Jaminan persalinan bagi yang tidak mampu yang belum memiliki jaminan Kesehatan</li> <li>9. Koordinasi dengan lintas sektor terkait (PUPR, Dinas</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan kesehatan pada balita ( 79.2% Tahun 2020, 97.67% Tahun 2021 dan Tahun 2022, 100%</li> <li>• Rasio Tenaga Kesehatan dengan Penduduk Kab. Solok (Dokter 1 : 69.835, Bidan 1 : 798, perawat 1 : 1.426</li> <li>• Rasio Fasyankes dengan jumlah penduduk Kab. Solok Puskesmas 1 : 19.671, Pustu 1 : 4.449, Polindes 1 : 1.369</li> <li>• Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan 66,19%</li> <li>• Jumlah Dukun aktif di Kabupaten Solok 83 orang</li> </ul>	<p>Pada Bayi Baru Lahir sesuai standar Outcome: Angka Kematian Bayi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pelayanan Kesehatan Pada Balita Sesuai Standar Input: Rp. 151.680.000 Output: Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Balita sesuai standar Outcome: Angka Kematian Bayi</li> <li>5. Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan Input: Rp. 140.000.000 Output: Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan Outcome: Fasyankes memiliki tenaga kesehatan sesuai standar</li> <li>6. Promosi kesehatan di semua tatanan Input: Rp. 750.274.610 Output: Jumlah Media promosi yang tersedia Outcome: Keluarga Ber PHBS</li> <li>7. Pengadaan sarana dan prasarana dan alat kesehatan Input: Rp. 2.500.000.000 Output: Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia Outcome: Persentase fasyankes yang</li> </ol>
--	--	--	--	--	---	---	--

	(enam) tangan atau 3 (tiga) orang tenaga kesehatan (Dokter dan Bidan) sementara di Kab. Solok masih 1 (satu) unit puskesmas dikelola oleh 1 (satu) petugas kesehatan					Perhubungan dan Dinas Sosila		memiliki sarana, prasarana dan alkes sesuai standar
--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	---

Arosuka, Maret 2023  
Kepala Dinas Kesehatan Kab.Solok



**ZULHEDDRI, SKM. M. Kes**  
NIP. 19660604 198703 1 005

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK  
TAHUN 2024**

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
NAMA KEBIJAKAN/ PROGRAM KEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Factor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data	Indikator Kinerja
<p><b>Program:</b> Program Rehabilitasi Sosial</p> <p><b>Kegiatan:</b> Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <p><b>Sub Kegiatan:</b> Penyediaan Alat Bantu</p> <p><b>Tujuannya:</b> Mewujudkan pelayanan kesejahteraan Sosial yang berkualitas bagi penyandang Disabilitas</p>	<p>1. Permensos No. 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial potensi dan sumber kesejahteraan sosial</p> <p>2. Jenis PPKS berdasarkan Permensos No. 8 Tahun 2012 terdiri dari 26 Jenis.</p> <p>3. Salah satu jenis PPKS yaitu: Penyandang Disabilitas</p> <p>5. Jumlah Pekerja Sosial (2 Orang)</p>	<p>Adanya ketidaksetaraan gender di bidang kesejahteraan sosial dalam hal pelayanan kepada disabilitas laki-laki dan perempuan.</p> <p>Perempuan lebih banyak menerima bantuan disabilitas dikarenakan perempuan penyandang Disabilitas mengalami kerentanan kemiskinan yang lebih besar dibandingkan laki-laki penyandang disabilitas</p> <p><b>AKSES</b> Masih rendahnya</p>	<p>1) Kurangnya pemahaman tentang PUG bagi tenaga Pekerja Sosial</p> <p>2) Masih kurangnya sosialisasi permensos mengenai penyandang Disabilitas</p> <p>3) Masih kurangnya Jumlah pekerja Sosial</p> <p>4) Masih Kurangnya Sarana dan prasarana untuk melakukan pendataan</p> <p>5) Kurangnya Media informasi mengenai</p>	<p>1) Faktor Budaya bahwa disabilitas kurang berperan dalam masyarakat</p> <p>2) Masih rendahnya Dukungan dari nagari terhadap pelayanan terhadap Disabilitas</p>	<p>Mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS Penyandang Disabilitas</p>	<p>1) Menyusun panduan bantuan Sosial yang responsif gender</p> <p>2) Menyusun Juknis dan Sosialisai tentang PPRG bagi Pekerja Sosial di Nagari dan Permensos no 8 Tahun 2012</p> <p>3) Menambah tenaga Pekerja Sosial</p> <p>4) Pengadaan Sarana Prasarana untuk Pendataan</p> <p>5) Meningkatkan Pengadaan Media Informasi</p>	<p>1) Jumlah disabilitas yang telah dibantu kursi roda 80 Orang, alat bantu dengar 25 Orang</p> <p>L= 40 Jiwa P= 65 Jiwa</p> <p>2) Jumlah Pekerja Sosial (2 Orang)</p>	<p>Jumlah pelayanan kesejahteraan sosial bagi disabilitas berupa pemberian alat bantu</p> <p>Outcome: Meningkatnya pelayanan bantuan khususnya alat bantu disabilitas yang responsif gender</p> <p>Angka Penyandang Disabilitas 1263 Jiwa P= 687 Jiwa L= 576 Jiwa</p> <p>Input: Rp. 115.000.000 untuk alat bantu (kursi roda 40 unit dan untuk alat bantu dengar 30 Unit)</p> <p>2. Pemberian BIMTEK bagi Pekerja Sosial di Nagari sebanyak 74 Orang</p> <p>Input: Rp. 150.000.000</p>

<p>6. Angka Penyandang Disabilitas 1263 Jiwa P= 687 Jiwa L= 576 Jiwa</p> <p>7. Jumlah disabilitas yang telah dibantu kursi roda 80 Orang, alat bantu dengar 25 Orang</p> <p>8. Mayoritas penerima bantuan alat bantu kursi roda, dan alat bantu dengar saat ini adalah perempuan</p> <p>L= 40 Jiwa P= 65 Jiwa</p>	<p>informasi penerima bantuan sosial bagi penyandang Disabilitas</p> <p><b>PARTISIPASI</b> Jumlah Disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial masih relatif rendah</p> <p><b>KONTROL</b> Masih Kurangnya Perhatian masyarakat atau nagari terhadap Penyandang Disabilitas</p> <p><b>MANFAAT</b> Belum semua disabilitas merasakan manfaat dari bantuan kursi roda dan alat bantu dengar</p>	<p>Penyandang Disabilitas</p> <p>6) Masih kurangnya bantuan disabilitas berupa kursi roda dan alat bantu dengar</p> <p>7) Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektor (nagari)</p>				<p>6) Meningkatkan Pengadaan Kursi Roda dan Alat bantu dengar bagi Disabilitas</p> <p>7) Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sektor</p>		
---	---	--	--	--	--	---	--	--

Arosuka, Maret 2023  
Kepala Dinas Sosial



**Ir. SYOUFITRI**  
NIP. 19701115 200502 2 002

**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK  
TAHUN 2024**

<b>PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)</b>	
<b>SKPD</b>	: DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK
<b>TAHUN</b>	: Tahun Anggaran 2024
<b>ANGGARAN</b>	
<b>PROGRAM</b>	REHABILITASI SOSIAL
<b>KODE PROGRAM</b>	1.06.04
<b>KEGIATAN</b>	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
<b>SUB KEGIATAN</b>	Penyediaan Alat Bantu
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permensos No. 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial potensi dan sumber kesejahteraan sosial</li> <li>• Jenis PPKS berdasarkan Permensos No. 8 Tahun 2012 terdiri dari 26 Jenis.</li> <li>• Salah satu jenis PPKS yaitu Penyandang Disabilitas</li> <li>• Jumlah Pekerja Sosial (2 Orang)</li> <li>• Angka Penyandang Disabilitas 1263 Jiwa <ul style="list-style-type: none"> <li>P= 687 Jiwa</li> <li>L= 576 Jiwa</li> </ul> </li> <li>• Jumlah disabilitas yang telah dibantu kursi roda 80 Orang, alat bantu dengar 25 Orang</li> <li>• Mayoritas penerima bantuan alat bantu kursi roda, dan alat bantu dengar saat ini adalah perempuan <ul style="list-style-type: none"> <li>L= 40 Jiwa</li> <li>P= 65 Jiwa</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p><b>a. Faktor Kesenjangan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya ketidaksetaraan gender di bidang kesejahteraan sosial dalam hal pelayanan kepada disabilitas laki-laki dan perempuan.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perempuan lebih banyak menerima bantuan disabilitas dikarenakan perempuan penyandang Disabilitas mengalami kerentanan kemiskinan yang lebih besar dibandingkan laki-laki penyandang disabilitas</li> </ul> <p><b><u>PARTISIPASI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial masih relatif rendah</li> </ul> <p><b><u>KONTROL</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya Perhatian masyarakat atau nagari terhadap Penyandang Disabilitas</li> </ul> <p><b><u>MANFAAT</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum semua disabilitas merasakan manfaat dari bantuan kursi roda dan alat bantu dengar</li> </ul> <p><b>b. Penyebab Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pemahaman tentang PUG bagi tenaga Pekerja Sosial</li> <li>• Masih kurangnya sosialisai permensos mengenai penyandang Disabilitas</li> <li>• Masih kurangnya Jumlah pekerja Sosial</li> <li>• Masih Kurangnya Sarana dan prasarana pekerja sosial untuk melakukan pendataan</li> <li>• Kurangnya Media informasi mengenai Penyandang Disabilitas</li> <li>• Masih kurangnya bantuan disabilitas berupa kursi roda dan alat bantu dengar</li> <li>• Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektor (nagari).</li> </ul> <p><b>c. Penyebab Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor Budaya bahwa disabilitas kurang berperan dalam masyarakat</li> <li>• Masih rendahnya Dukungan dari nagari terhadap pelayanan terhadap Disabilitas</li> </ul>		
<b>RENCANA AKSI</b>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="470 1503 526 1563">1)</td> <td data-bbox="526 1503 1321 1563">Menyusun panduan bantuan Sosial yang responsif gender</td> </tr> </table>	1)	Menyusun panduan bantuan Sosial yang responsif gender
1)	Menyusun panduan bantuan Sosial yang responsif gender		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="470 1563 526 1644">2)</td> <td data-bbox="526 1563 1321 1644">Menyusun Juknis dan Sosialisai tentang PPRG bagi Pekerja Sosial di Nagari dan Permensos no 8 Tahun 2012</td> </tr> </table>	2)	Menyusun Juknis dan Sosialisai tentang PPRG bagi Pekerja Sosial di Nagari dan Permensos no 8 Tahun 2012
2)	Menyusun Juknis dan Sosialisai tentang PPRG bagi Pekerja Sosial di Nagari dan Permensos no 8 Tahun 2012		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="470 1644 526 1682">3)</td> <td data-bbox="526 1644 1321 1682">Menambah tenaga Pekerja Sosial</td> </tr> </table>	3)	Menambah tenaga Pekerja Sosial
3)	Menambah tenaga Pekerja Sosial		

	4)	Pengadaan Sarana Prasarana untuk Pekerja Sosial
	5)	Meningkatkan Pengadaan Media Informas
	6)	Meningkatkan Pengadaan Kursi Roda dan Alat bantu dengar bagi Disabilitas
	7)	Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sektor
<b>CAPAIAN PROGRAM</b> (di level kegiatan)		<p>Jumlah pelayanan kesejahteraan sosial bagi disabilitas berupa pemberian alat bantu</p> <p>Outcome: Meningkatnya pelayanan bantuan khususnya alat bantu disabilitas yang responsif gender</p> <p>Angka Penyandang Disabilitas 1263 Jiwa P= 687 Jiwa L= 576 Jiwa</p> <p>Input: Rp. 115.000.000 untuk alat bantu (kursi roda 40 unit dan untuk alat bantu dengar 30 Unit)</p> <p>2. Pemberian BIMTEK bagi Pekerja Sosial di Nagari sebanyak 74 Orang</p> <p>Input: Rp. 150.000.000</p>

Arosuka, Maret 2023

Kepala Dinas Sosial



Ir. SYOUFITRI  
NIP. 19701115 200502 2 002

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Dasar Hukum UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Akses :	Kurang sosialisasi PP No 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas	Penurunan angka kecelakaan lalu lintas bagi seluruh lapisan masyarakat	Sosialisasi mengenai PP No 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui media sosial dan sosialisasi langsung kepada masyarakat	Jumlah petugas PAM lalin ( laki – laki dan perempuan ) ( 90% : 10% )	Sosialisasi mengenai PP No 37 Tahun 2017 tentang keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
		kurangnya petugas PAM lalin sementara Banyaknya 40 titik PAM lalin dengan 50 Petugas (48 laki-laki 2 perempuan)						Input: Rp. 40.000.000,
Kegiatan :	Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Kurangnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) petugas PAM lalin			Penambahan dan peningkatan SDM petugas PAM lalin		Out put
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya		Partisipasi	Belum semua lokasi/titik - titik rawan kecelakaan lalu lintas yang bisa diberikan pengamanan				Jumlah lokasi /Titik-titik PAM lalin. (40 titik)	Tertelaksananya sosialisasi mengenai keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
	Data Petugas Pengamanan lalu lintas ( PAM lalin ) laki-laki 48 dan Perempuan 2	Kurangnya pengetahuan pengguna jalan untuk tertib lalu lintas	Sarana dan Prasarana Petugas PAM dilapangan belum lengkap			Pengadaan sarana dan prasarana Keselamatan Lalu Lintas		Outcome :
Tujuan :							Jumlah Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas yang tersedia	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas di titik rawan lalu lintas (5%/tahun)
Terwujudnya penurunan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya	Data lokasi/ titik- titik PAM lalin. 40 titik terdapat 15 titik prioritas (persimpangan di jalan nasional yang ada di Kabupaten Solok)	Kontrol :	masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektoral	Kurangnya koordinasi dengan lintas sektoral		Melakukan koordinasi dan sinergi dengan lintas sektoral		Peningkatan Mutu dan Kualitas SDM petugas PAM lalin.
		kurangnya pengawasan dari koordinator petugas PAM lalin yang terlatih					Persentase angka kecelakaan lalu lintas (5%/tahun)	Input : Rp. 50.000.000,-
	Data laka lalin dalam 1 tahun							Output
								Penambahan dan peningkatan SDM petugas PAM
	Jumlah Pengawas petugas PAM dilapangan (50 orang)							Outcome
								Meningkatnya partisipasi petugas PAM
								Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas
								Input : Rp.60.000.000,-
								Output
								Pengadaan sarana dan prasarana Keselamatan
								Outcome
								Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas di titik rawan lalu lintas
								koordinasi dengan lintas sektoral
								Input : Rp.25.000.000,-
								Output
								Melakukan koordinasi dan bersinergi dengan lintas sektoral
								Outcome
								Menurunkan titik daerah rawan lalu lintas

Koto Baru, Maret 2023  
a.n Kepala Dinas Perhubungan  
Sekretaris

  
BARDIANSYAH, SH  
NIP. 19650912 198903 1 007

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

**SKPD** : Dinas Perhubungan Kabupaten Solok

**TAHUN ANGGARAN** : 2023

<b>Program</b>	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
<b>Kode Program</b>	2.15.02.2.08.01
<b>Kegiatan</b>	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ
<b>Sub Kegiatan</b>	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
<b>Hasil / Output</b>	Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

<b>Analisis Situasi</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan</li><li>• PP No 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan</li></ul> <p>Jumlah petugas PAM Lalin</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 48 laki-laki</li><li>✓ 2 perempuan</li></ul> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p>➤ <b>Faktor Kesenjangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Akses</b> Kurangnya Jumlah Petugas PAM Perempuan dan Banyaknya titik PAM Lalin yang harus dijaga</li><li>• <b>Partisipasi</b> Kurangnya pelatihan dan pengetahuan pengguna jalan untuk tertib lalu lintas</li><li>• <b>Kontrol</b> Kurangnya pengawasan dari coordinator PAM Lalin</li><li>• <b>Manfaat</b> Meningkatnya kualitas dan Kuantitas PAM Lalin Perempuan</li></ul> <p>➤ <b>Penyebab Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya Sosialisasi kepada petugas lalin</li><li>• Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Petugas PAM Lalin Perempuan</li><li>• Sarana dan Prasarana petugas PAM Lalin dilapangan belum lengkap ya</li></ul>
-------------------------	--

<b>Rencana Aksi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sosialisasi mengenai PP 37 tahun 2017 tebtabf keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui media sosial dan sosialisasi langsung kepada masyarakat</li> <li>✓ Penambahan dan peningkatan bSDM Petugas PAM Lalin</li> <li>✓ Pengadaan sarana dan prasarana keselamatan Lalu lintas</li> <li>✓ Melakukan koordinasi dan sinergi dengan lintas sektoral</li> </ul>
<b>Capaian program</b>	Penurunan angka kecelakaan lalu lintas bagi seluruh lapisan masyarakat

Koto Baru, 14 Maret 2023

a.n KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

SEKRETARIS

  
**BARDIANSYAH, SH**

**NIP 19650912 198903 1 007**

## Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

### OPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p><b>Program :</b> Program Pengelolaan Pendidikan</p> <p><b>Kegiatan :</b> Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</p> <p><b>Subkegiatan :</b> Pembangunan Perpustakaan Sekolah dan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</p> <p><b>Tujuan :</b> Tersedianya gedung pustaka sekolah dan ruang UKS yang layak dan nyaman dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran siswa terhadap pentingnya ilmu pengetahuan dan kesehatan</p>	<p>Dasar regulasi subkegiatan pembangunan perpustakaan sekolah, yaitu: Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa terdapat 6 standard nasional perpustakaan, yaitu: standard koleksi perustakaan, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, an standard pengelolaan. Selain itu, dalam sekolah diminta untuk: memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan</p>	<p>Kondisi Pustaka Sekolah yang sudah tidak layak pakai, sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung pustaka UKS yang ada saat ini dibawah standar ukuran yang ditetapkan dan sudah tidak representatif lagi sebagai ruang UKS Ruang UKS saat ini dibawah standar</p>	<p>Kondisi bangunan pustaka, UKS di sekolah lain rata-rata belum representatif dan memerlukan kesegeraan penanganan yang sama</p> <p>- Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk memperbaiki bangunan pustaka</p>	<p>Masih kurangnya lama kunjungan siswa ke pustaka Koleksi perpustakaan masih kurang lengkap Masih kurangnya kesadaran warga sekolah akan kesehatan lingkungan sekolah Lahan ada namun terbatas</p>	<p>Tersedianya gedung pustaka sekolah dan ruang UKS yang layak dan nyaman dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran siswa terhadap pentingnya ilmu pengetahuan dan kesehatan Yang berbasis responsif gender</p>	<p>Menyediakan buku koleksi perpustakaan yang lebih lengkap Menyediakan fasilitas pendukung kenyamanan dalam perpustakaan Membuat kegiatan Pengelolaan UKS Terpadu (perilaku hidup bersih dan sadar sehat lingkungan di seluruh warga sekolah)</p> <p>- Memfokuskan anggaran untuk perbaikan bangunan pustaka, UKS agar sesuai standar nasional</p>	<p>Bangunan pustaka sekolah yang belum ada: - 47 bangunan</p> <p>- 220 bangunan</p>	<p><b>Output :</b> Rumusan Kinerja : - Bangunan Pustaka yang sesuai Standar Nasional Pendidikan - Bangunan UKS dan Kantin yang representatif dan sesuai dengan standar</p> <p><b>Indikator Kinerja :</b> - Tersedianya bangunan Pustaka yang sesuai Standar Nasional Pendidikan - Tersedianya Bangunan UKS dan Kantin yang representatif dan sesuai standar</p>

<p><b>Indikator Kinerja :</b> Tersedianya bangunan Pustaka dan ruang UKS dan yang permanen, standard, nyaman, representatif, dan layak pakai.</p>	<p>pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik; mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan; mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.</p>	<p>ukuran yang ditetapkan dan sudah tidak representatif lagi sebagai ruang UKS</p> <p><b>Akses</b> - Ketidaklayakan kondisi pustaka dan kantin menyulitkan peserta didik khususnya yang perempuan mendapatkan ruang dan waktu yang nyaman saat menggunakan pustaka atau mengkonsumsi makanan</p> <p><b>Partisipasi</b> - Jumlah siswa lelaki lebih banyak dibanding siswa perempuan</p> <p><b>Kontrol</b> - Representatif perempuan</p>	<p>UKS di sekolah lain</p>					<p><b>Outcome : Rumusan Kinerja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kunjungan peserta didik ke pustaka</li> <li>- Membudayanya perilaku suka membaca di kalangan peserta didik</li> <li>- Meningkatnya taraf kesehatan siswa</li> <li>- Menurunnya jumlah siswa yang mengalami sakit diare akibat kontaminasi bakteri, virus atau parasit pada tangan yang tidak bersih</li> <li>- Menurunnya tingkat ketiak hadiran peserta didik karena sakit</li> <li>- Meningkatnya pengetahuan sikap dan keterampilan peserta didik akan sikap dan</li> </ul>
<p>1. Meningkatnya kunjungan peserta didik ke pustaka baik laki-laki maupun perempuan</p> <p>2. Meningkatnya kebiasaan membaca di kalangan peserta didik baik laki-laki maupun perempuan</p> <p>3. Meningkatnya pemahaman peserta didik baik laki-laki maupun perempuan terhadap program Tias UKS: pendidikan, pelayanan, dan pembinaan lingkungan</p> <p>4. Meningkatnya kesadaran peserta didik baik laki-laki maupun perempuan terhadap pentingnya kesehatan diri, sekolah, dan lingkungan masyarakat</p>	<p>pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik; mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan; mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.</p> <p>Dasar regulasi subkegiatan</p> <p>Pembangunan Ruang UKS adalah Peraturan Bersama 4 Menteri, yaitu: Mendikbud RI nomor 6/X/PP/2014, Menkes RI nomor 73 tahun 2014, tentang pedoman, Menag RI nomor 41 tahun 2014, dan Mendagri RI nomor</p>	<p>ukuran yang ditetapkan dan sudah tidak representatif lagi sebagai ruang UKS</p> <p><b>Akses</b> - Ketidaklayakan kondisi pustaka dan kantin menyulitkan peserta didik khususnya yang perempuan mendapatkan ruang dan waktu yang nyaman saat menggunakan pustaka atau mengkonsumsi makanan</p> <p><b>Partisipasi</b> - Jumlah siswa lelaki lebih banyak dibanding siswa perempuan</p> <p><b>Kontrol</b> - Representatif perempuan</p>	<p>UKS di sekolah lain</p>					<p><b>Outcome : Rumusan Kinerja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kunjungan peserta didik ke pustaka</li> <li>- Membudayanya perilaku suka membaca di kalangan peserta didik</li> <li>- Meningkatnya taraf kesehatan siswa</li> <li>- Menurunnya jumlah siswa yang mengalami sakit diare akibat kontaminasi bakteri, virus atau parasit pada tangan yang tidak bersih</li> <li>- Menurunnya tingkat ketiak hadiran peserta didik karena sakit</li> <li>- Meningkatnya pengetahuan sikap dan keterampilan peserta didik akan sikap dan</li> </ul>

	<p>Pengunjung pustaka Ruang UKS yang ada saat ini rata-rata dibawah standar ukuran yang ditetapkan dan sudah tidak representatif lagi sebagai ruang UKS, sedangka kantin yang ada adalah sebagian besar adalah bangunan non-permanen yang dijadikan sebagai kantin sementara.</p> <p><b>Data Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 361 SD</li> <li>- Jumlah peserta didik SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 44.815 orang</li> <li>- Jumlah guru SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 3.250 orang</li> </ul> <p><b>Akses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah gedung perpustakaan SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 324 unit.</li> <li>- Kondisi gedung perpustakaan SD yang belum ada di Kabupaten Solok saat ini adalah 37 unit</li> <li>- Jumlah gedung UKS</li> </ul>							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan, sikap dan keterampilan alam dan lingkungan diantara seluruh warga sekolah</li> <li>- Asupan gizi dan nutrisi baik harian bagi siswa selama jam sekolah</li> </ul> <p><b>Anggaran :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana SD sebesar 10,4 Milyar Rupiah</li> <li>- Anggaran Kegiatan (pendukung rencana aksi) Peningkatan Gizi Peserta Didik Berbasis Potensi Lokal sebesar 250 Juta Rupiah</li> </ul>
--	---	--	--	--	--	--	--	---

	<p>SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 141 unit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi gedung UKS SD yang belum ada di Kabupaten Solok saat ini adalah 220 unit</li> </ul> <p><b>Partisipasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Peserta SD laki-laki 23.186 orang dan perempuan 21.632 orang</li> </ul> <p><b>Kontrol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guru 695 laki-laki dan Perempuan SD 2.555 orang</li> </ul> <p><b>Manfaat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menginkatnya kunjungan peserta didik ke pustaka baik laki-laki maupun perempuan sehingga kebiasaan membaca di kalangan peserta didik baik laki-laki maupun perempuan menjadi meningkat. Selain itu, dalam rangka pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, maka diperlukan ruang perpustakaan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan</li> </ul>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>wawasan siswa mengenai literasi membaca, numerasi, sains, TIK, finansial, serta budaya dan kewargaan/ kemasyarakatan</p> <p>Meningkatnya pemahaman peserta didik baik laki-laki maupun perempuan terhadap program Trias UKS: pendidikan, pelayanan, dan pembinaan lingkungan sehingga tumbuhnya kesadaran terhadap pentingnya kesehatan diri, sekolah, dan lingkungan masyarakat</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Arosuka, Januari 2023


  
 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
 Kabupaten Solok  
**ZAINAL JUSMAN, S.Pd, MM, M.Si**  
 NIP. 19780516199303 1004

**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK**

NO.	ASPEK	URAIAN
1.	<b>Program Kegiatan Subkegiatan</b>	Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1. Pembangunan Perpustakaan Sekolah 2. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
2.	<b>Output Subkegiatan</b>	<b>UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kab. Solok</b> Tersedianya gedung pustaka sekolah dan ruang UKS yang layak dan nyaman dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran siswa terhadap pentingnya ilmu pengetahuan dan kesehatan.
3.	<b>Analisis Situasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi sekarang perpustakaan sejumlah sekolah dari segi struktur sudah tidak layak pakai, sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung pustaka.</li> <li>2. Ruang UKS yang ada saat ini rata-rata dibawah standar ukuran yang ditetapkan dan sudah tidak representatif lagi sebagai ruang UKS, sedangkan kantin yang ada adalah sebagian besar adalah bangunan non-permanen yang dijadikan sebagai kantin sementara.</li> <li>3. Kondisi Pustaka Sekolah yang belum ada di beberapa satuan pendidikan SD, sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung pustaka.</li> <li>4. Ruang UKS yang belum ada di beberapa satuan pendidikan SD.</li> <li>5. Ruang UKS yang ada saat ini di bawah standar ukuran yang ditetapkan dan sudah tidak representatif lagi sebagai ruang UKS</li> </ol> <p><b>Data Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 361 SD</li> <li>- Jumlah peserta didik SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 44.815 orang</li> <li>- Jumlah guru SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 3.250 orang</li> </ul> <p><b>Akses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah gedung perpustakaan SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 314 unit.</li> <li>- Kondisi perpustakaan SD yang belum ada di Kabupaten Solok saat ini adalah 47 unit.</li> <li>- Jumlah gedung UKS SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 141 unit.</li> <li>- Kondisi UKS SD yang belum ada di Kabupaten Solok saat ini adalah 220 unit</li> </ul> <p><b>Partisipasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Peserta SD laki-laki 23.186 orang dan perempuan 21.21.632 orang</li> </ul> <p><b>Kontrol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guru 695 laki-laki dan Perempuan SD 2.555 orang</li> </ul> <p><b>Manfaat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kunjungan peserta didik ke pustaka baik laki-laki maupun perempuan sehingga kebiasaan membaca di kalangan peserta didik baik laki-laki maupun</li> </ul>

		<p>perempuan menjadi meningkat. Selain itu, dalam rangka pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, maka diperlukan ruang perpustakaan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan siswa mengenai literasi membaca, numerasi, sains, TIK, finansial, serta budaya dan kewargaan/ kemasyarakatan</p> <p>– Meningkatnya pemahaman peserta didik baik laki-laki maupun perempuan terhadap program Trias UKS: pendidikan, pelayanan, dan pembinaan lingkungan sehingga tumbuhnya kesadaran terhadap pentingnya kesehatan diri, sekolah, dan lingkungan masyarakat</p>	
4	<b>Rencana Aksi</b>	Komponen input 1	<p>Menyediakan buku koleksi perpustakaan yang lebih lengkap</p> <p><b>Output:</b> Persentase kunjungan peserta didik ke pustaka</p> <p><b>Anggaran:</b> Rp. 200.000.000,-</p>
		Komponen input 2	<p>Menyediakan fasilitas pustaka dan pendukung kenyamanan dalam perpustakaan</p> <p><b>Output:</b> Persentase Bangunan Pustaka yang sesuai Standar Nasional Pendidikan</p> <p><b>Anggaran:</b> Rp. 3.085.971.000,-</p>
		Komponen input 3	<p>Membuat kegiatan Pengelolaan UKS Terpadu (perilaku hidup bersih dan sadar sehat lingkungan di seluruh warga sekolah)</p> <p><b>Ouput:</b> Persentase Satuan Pendidikan yang melaksanakan program UKS Terpadu</p> <p><b>Anggaran:</b> Rp. 2.678.886.000</p>
		Komponen input 4	<p>Menyediakan fasilitas UKS dan pendukung kenyamanan dalam ruang UKS</p> <p><b>Ouput:</b> Persentase Bangunan UKS dan Kantin Sekolah yang representatif dan sesuai dengan standar</p> <p><b>Anggaran:</b> Rp. 820.349.900</p>
5.	<b>Alokasi Anggaran Output Subkegiatan</b>	– Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan SD sebesar 3.085.971.000,-	
6.	<b>Dampak/ Hasil Output Subkegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kunjungan peserta didik ke pustaka</li> <li>2. Membudayanya perilaku suka membaca di kalangan peserta didik</li> <li>3. Meningkatnya taraf kesehatan siswa</li> <li>4. Menurunnya jumlah siswa yang mengalami sakit diare akibat kontaminasi bakteri, virus atau parasit pada tangan yang tidak bersih</li> <li>5. Menurunnya tingkat ketiak hadiran peserta didik karena sakit</li> <li>6. Meningkatnya pengetahuan sikap dan keterampilan peserta didik akan sikap dan perilaku hidup sehat</li> </ol>	

		7. Meningkatnya Kesadaran kesehatan alam dan lingkungan siantara seluruh warga sekolah 8. Meningkatnya asupan gizi dan nutrisi baik bagi siswa selama jam sekolah
--	--	--

Arosuka, Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olaharaga Kabupaten Solok



**ZAINAL JUSMAR, S.Pd, MM, M.Si**

Pembina Tk. I/IV.B

NIP. 19730516-199903 1004

## GAP (Gender Analysis Pathway)

SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok

Tahun : 2023

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>PROGRAM :</b> Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	<b>Data Pembuka Wawasan</b>	<b>Isu Gender</b>			<b>Kebijakan dan Rencana Ke Depan</b>		<b>Pengukuran Hasil</b>	
		<b>Faktor Kesenjangan</b>	<b>Sebab Kesenjangan Internal</b>	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>	<b>Reformulasi Tujuan</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Data Dasar (Base-line)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>KEGIATAN :</b> pemeriksaan dan pengawasan Koperasi	Data Yang dibutuhkan : 1. Data jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Solok. 2. Data jumlah pelaku usaha yang laki-laki 3. Data jumlah pelaku Usaha yang perempuan 4. Data pelaku usaha yang aktif dan yang pasif	<b>Akses:</b> Belum semua pelaku usaha yang ada di Kabupaten Solok mau ikut menjadi anggota koperasi Kurangnya minat pelaku usaha laki-laki mau ikut menjadi anggota koperasi Partisipasi Masih rendahnya partisipasi pelaku usaha laki-laki yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurangnya kuantitas pelaku usaha laki-laki untuk menjadi anggota koperasi</li> <li>▪ Kurangnya minat pelaku usaha untuk menjadi anggota koperasi karena kurang sadar akan pentingnya peran koperasi untuk melanjutkan usaha kedepannya</li> <li>▪ Kurangnya</li> </ul>	1. laki-laki cenderung lebih cepat bosan mengikuti pelatihan koperasi. 2. Karena jauhnya jarak pelaku usaha ke tempat pelatihan 3. Menurunnya minat pelaku usaha yang aktif karena dampak covid yang menyebabkan pelaku usaha yang gulung	Meningkatkan persentase pelaku usaha yang menjadi anggota koperasi	1. Membentuk tim enumerator pelaku usaha per kecamatan 2. Sosialisasi ke pelaku usaha untuk meningkatkan pentingnya ikut menjadi anggota koperasi 3. Pembinaan dan Koordinasi dengan SKPD terkait / lintas sektor. 4. Peningkatan	1. Pelaku usaha yang laki-laki dalam mengikuti pelatihan sebanyak 35 % (1.925 pelaku usaha) 2. Pelaku usaha yang laki-laki sebanyak 5.500 3. Jumlah pelaku usaha seluruhnya 12.653	1. Pembinaan ke pelaku usaha dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk ikut menjadi koperasi demi kelangsungan produk kedepannya In put Membangkitkan semangat pelaku usaha yang laki-laki dalam mengikuti pelatihan Out Put Tersedianya daftar

<p><b>Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b></p> <p><b>TUJUAN :</b> Meningkatkan persentase Pelaku Usaha untuk menjadi Anggota Koperasi</p> <p><b>SASARAN :</b> Pelaku Usaha yang Laki-laki</p>		<p>mau menjadi anggota koperasi</p> <p><b>Kontrol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya minat pelaku usaha yang laki-laki ikut menjadi anggota koperasi</li> </ul> <p><b>Manfaat</b></p> <p>DKUKMPP setiap tahun memfasilitasi pelaku usaha untuk menjadi anggota koperasi</p>	<p>pembinaan ke pelaku usaha karena munculnya pelaku usaha baru yang belum terdaftar di DKUKMPP</p>	<p>tikar</p>		<p><b>SDM</b> ( Kualitas dan Kuantitas) dalam pembinaan terhadap pelaku usaha</p>		<p>pelaku usaha yang akan digunakan sebagai acuan untuk pemberian pembinaan dan bantuan</p> <p>3. pembinaan dan Koordinasi dengan SKPD terkait / lintas sektor.</p>
---	--	---	---	--------------	--	---	--	---

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

<b>SKPD</b>	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok	
<b>ALAMAT</b>	: Jln. Raya Solok-Padang KM. 5 Koto Baru	
<b>TAHUN</b>	: 2023	
<b>ANGGARAN</b>		
<b>PROGRAM</b>	: Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
<b>KODE PROGRAM</b>	:	
<b>KEGIATAN</b>	: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
<b>SUB KEGIATAN</b>	: Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
<b>HASIL/OUTPUT</b>	Meningkatkan persentase Pelaku Usaha untuk menjadi Anggota Koperasi	
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p>Data Pembuka Wawasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Solok.</li> <li>2. Data jumlah pelaku usaha yang laki-laki</li> <li>3. Data jumlah pelaku Usaha yang perempuan</li> <li>4. Data pelaku usaha yang aktif dan yang pasif</li> </ol> <p><b><u>Akses:</u></b></p> <p>Belum semua pelaku usaha yang ada di Kabupaten Solok mau ikut menjadi anggota koperasi</p> <p>Kurangnya minat pelaku usaha laki-laki mau ikut menjadi anggota koperasi</p> <p><b><u>Partisipasi</u></b></p> <p>Masih rendahnya partisipasi pelaku usaha laki-laki yang mau menjadi anggota koperasi</p> <p><b><u>Kontrol</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya minat pelaku usaha yang laki-laki ikut menjadi anggota koperasi</li> </ul> <p><b><u>Manfaat</u></b></p> <p>DKUKMPP setiap tahun memfasilitasi pelaku usaha untuk menjadi anggota koperasi</p>	
<b>PERENCANAAN KEGIATAN</b>	Rencana Aksi	
	Tujuan	Meningkatkan persentase pelaku usaha yang menjadi anggota koperasi
	Aktifitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk tim enumerator pelaku usaha per kecamatan</li> <li>2. Sosialisasi ke pelaku usaha untuk meningkatkan akan pentingnya</li> </ol>

			<p>ikut menjadi anggota koperasi</p> <p>3. Pembinaan dan Koordinasi dengan SKPD terkait / lintas sektor.</p> <p>4. Peningkatan SDM ( Kualitas dan Kuantitas) dalam pembinaan terhadap pelaku usaha</p>
		<b>Sumber Daya ( Out Put )</b>	Dana : Rp. 32.500.000,-,-
			Panitia : DKUKMPP
			Peserta : Pelaku Usaha, Pengurus Koperasi
			Saran Prasarana : ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak dan Bahan Komputer.
		Out Come	<p><b>Rumusan Kinerja</b> Meningkatkan persentase pelaku usaha yang menjadi anggota koperasi</p> <p><b>Indikator Kinerja</b> Pembinaan ke pelaku usaha dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk ikut menjadi koperasi demi kelangsungan produk kedepannya</p>
		 <p><b>KEPALA DINAS</b></p> <p><b>AHPI GUSTA TUSRI, S.STP, M.Si</b> Nip. 19800414 199801 2 001</p>	

**MATRICK**  
**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SOLOK**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender : Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan dan Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Monitoring Indikator Gender
<p><b>Program :</b> Pengelolaan Persampahan</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b> Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p> <p><b>Tujuan :</b> Meningkatkan Pemahaman masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup</p> <p><b>Sasaran</b> Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga</p>	<p>Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>Data informasi pengelolaan lingkungan hidup terkait antara lain :</p> <p>Pengolahan Sampah di TPA Regional</p> <p>TPA Regional 1 Unit dengan Jumlah Petugas Kebersihan sebanyak 38 Orang Laki laki 36 Orang Perempuan 2 Orang</p> <p>Jumlah TP 3R di Kabupaten Solok ada 3 Lokasi</p>	<p>1. Akses Kendaraan operasional Pengangkutan Sampah yang kurang memadai Baik Kualitas maupun jumlah</p> <p>Jarak tempuh ke TPA regional yang terlalu jauh dengan kondisi jalan yang jauh dan tidak memadai</p> <p>2. Partisipasi : -Kesenjangan dalam pengelolaan sampah rumah tangga lebih banyak dikerjakan oleh perempuan lebih kurang 80 %</p> <p>3. Kesenjangan Manfaat : Dimana manfaat dari kegiatan ini lebih dirasakan oleh kaum perempuan 60 % Dibanding laki-laki 40 %</p>	<p>1. Kurangnya sosialisasi tentang Juknis pengelolaan sampah</p> <p>2. Kurangnya jumlah petugas sampah</p> <p>3. Sarana dan prasarana (kendaraan roda empat dan roda tiga yang masih kurang</p> <p>4. Kurangnya sarana informasi dan promosi (Liflet, Brosur , Balho, Banner dan Media)</p> <p>5. Kurangnya koordinasi dengan lintas sektor</p> <p>6. Penyampaian Informasi kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik.</p> <p>7. Masih kurangnya pemahaman Laki-laki terkait pengelolaan sampah rumah tangga menjadi</p>	<p>1. Masih kurangnya pemahaman Masyarakat Tentang pengelolaan sampah</p> <p>2. Masih kurangnya pemahaman Masyarakat bahwa pengelolaan sampah rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan</p>	<p>Meningkatnya pemahaman pengelolaan sampah rumah tangga baik bagi laki laki maupun perempuan.</p>	<p>1. Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah rumah tangga (40 orang) per lokasi kegiatan</p> <p>2. Peningkatan sarana pemeliharaan sampah di rumah tangga</p> <p>3. Penguadaan sarana informasi dan promosi (Liflet, Brosur , Balho, Banner dan Media)</p> <p>4. Meningkatkan peminnaan dan koordinasi dengan lintas sektor</p>	<p>1. Petugas Kebersihan yang ada di dinas Lingkungan Hidup Sebanyak 38 Orang Laki laki 36 Orang Perempuan 2 Orang</p> <p>2. Jumlah Regional kabupaten Solok ada 1 Lokasi</p> <p>3. Kelompok Jumlah TP3R di Kabupaten Solok ada 3 Lokasi</p>	<p>1. Sosialisasi pengelolaan sampah untuk tahun 2024 direncanakan di 6 lokasi di Kab. Solok sebanyak 210 orang Input Rp. 85.489.000,-</p> <p>Output : Tersaksananya sosialisasi terhadap 210 orang</p> <p>Outcome : Meningkatnya Pemahaman pengelolaan rumah tangga oleh masyarakat</p> <p>1. Penguadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga . roda tiga 4 unit Untuk Becak Motor Input Rp. 180.000.000</p> <p>Output : Tersedianya sarana dan prasarana</p>

<p>laki-laki dan perempuan dalam pemilahan sampah</p> <p>4. Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam pengelolaan sampah rumah tangga</p>	<p>tanggungjawab perempuan</p>	<p>pengangkutan sampah sampah</p> <p>Outcome: Meningkatnya sarana dan prasarana pengangkutan sampah</p>
		<p>2. Rapat Koordinasi dengan lintas sektor untuk 100 Orang Input: Rp. 4.000.000 Output: Terlaksananya rapat koordinasi dengan lintas sektor</p> <p>Outcome : Terjalinya kerjasama dan sinergitas yang intens dengan instansi lintas sektor.</p>


  
 14 Maret 2023  
 ASNUR, SH., M.M.  
 NIP. 19681209 199312 2 001

**FORMAT GBS  
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok  
Tahun Anggaran : 2023

Program	: Pengelolaan Persampahan		
Kode Program	: 2.11.11.2.01.04		
Kegiatan	: Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		
Output	: Terlaksananya sosialisasi terhadap 210 orang		
Analisis Situasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilih Gender)</li> <li>2. Data Jumlah Kader Yang akan mengikuti Sosialisasi 40 (Empat Puluh) Orang per Lokasi Kegiatan . Perempuan 24 (Dua Puluh Empat) Orang Laki-laki 16 (Enam Belas) orang</li> <li>3. Lokasi Tempat dilaksanakannya sosialisasi (sedang di Survey)</li> <li>4. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesenjangan Partisipasi :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesenjangan dalam pengelolaan sampah rumah tangga, lebih banyak dikerjakan oleh perempuan yaitu lebih kurang 80 %</li> </ul> </li> <li>2. Kesenjangan Manfaat : Dimana manfaat dari kegiatan ini lebih dirasakan oleh kaum perempuan                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyebab internal :                       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian Informasi kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik</li> <li>2. Mindset laki-laki terkait pengelolaan sampah rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan</li> </ol> </li> <li>b. Penyebab Eksternal :                       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap sosialisasi mengenai pengelolaan sampah, pihak nagari lebih sering mengirim kader perempuan</li> <li>2. Sarana pemilahan sampah organic dan non organic belum tersedia di rumah tangga</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li></ol>		
Rencana Aksi	: Komponen	Tujuan	Memberikan Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah (40 orang) per Lokasi Kegiatan
		Alokasi Anggaran	Rp. 85.489.000,-

Arosuka, Maret 2023  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup



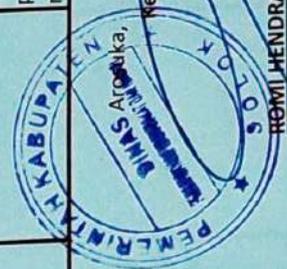
**ASNUR, SH, M.M**

NIP. 19681209 199312 2 001

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI  
KABUPATEN SOLOK**

Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender: Keterwakilan Laki-Laki dalam Lembaga Posyandu			Kebijakan dan Rencana Ke depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data	Indikator Kerja
<p><b>Program:</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p><b>Kegiatan:</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.</p> <p>Kegiatan oleh Kader Posyandu yang ada di Nagari</p>	<p><b>Akses:</b> Minimnya informasi yang di dapat oleh lembaga Kemasyarakatan yang ada di Nagari Khususnya Posyandu mengenai kesetaraan gender.</p> <p><b>Partisipasi:</b> Kader Posyandu yang ada di Kabupaten Solok semuanya perempuan</p>	<p>Mindset masyarakat bahwa kegiatan Posyandu adalah kegiatannya untuk perempuan saja.</p> <p>belum dilakukannya sosialisasi mengenai kesetaraan gender dalam suatu lembaga.</p>	<p>Kurangnya sarana informasi dan pengetahuan mengenai kesetaraan gender dalam lembaga baik di nagari, kecamatan dan kabupaten.</p>	<p>Membentuk kompetensi kepengurusan yang bagus berdasarkan kesetaraan gender dalam lembaga di Kabupaten, Kecamatan maupun Nagari.</p>	<p>Melaksanakan Sosialisasi berkala terhadap lembaga-lembaga yang ada di Nagari</p> <p>Mengadakan Bimtek atau peningkatan kapasitas bagi anggota atau kepengurusan lembaga-lembaga yang ada di Nagari</p> <p>Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap lembaga-lembaga yang ada di Nagari</p>	<p>Jumlah Pengurus Kader Posyandu di Kabupaten Solok pada Tahun 2022 adalah 3071 Orang dan semua kader adalah perempuan</p> <p><b>Input:</b> Rp. 165.000.000,-</p>	<p>1. Melaksanakan Sosialisasi mengenai pentingnya kesetaraan gender pada lembaga Kemasyarakatan di nagari khususnya Posyandu</p> <p><b>Output:</b> Terlaksananya Pembinaan terhadap Kader Posyandu yang ada di Kabupaten Solok</p>

<p><b>Sub Kegiatan:</b> Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p>	<p>Jumlah Posyandu yang ada di Kabupaten Solok adalah 616 Posyandu</p> <p>Jumlah Pengurus Kader Posyandu di Kabupaten Solok pada Tahun 2022 adalah 3071 Orang dan semua kader adalah perempuan</p>	<p><b>Outcome:</b> Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan keterampilan pengurus Laki-Laki pada Lembaga Kemasyarakatan Khususnya Posyandu Kabupaten Solok.</p> <p>2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap kelembagaan Posyandu di Kabupaten Solok</p> <p><b>input:</b> Rp. 165.000.000,-</p> <p><b>output:</b> terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Lembaga Posyandu di Kabupaten Solok</p> <p><b>outcome:</b> terhimpunnya segala permasalahan yang ada di lembaga Kemasyarakatan Khususnya Posyandu sehingga dapat dicari pemecahan masalahnya.</p>
--	--	--



Maret 2023  
Kepala,  
**ROMLI HENDRAWAN, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19731106 199303 1 002

**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)**  
**(Pernyataan Anggaran Gender)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI**

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI  
 TAHUN : 2023

<b>PROGRAM</b>	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
<b>KODE PROGRAM</b>	2 13 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
<b>KEGIATAN</b>	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
<b>SUB KEGIATAN</b>	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
<b>ANALISA SITUASI</b>	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender dan Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.</li> <li>Jumlah Posyandu yang ada di Kabupaten Solok adalah 616 Posyandu</li> <li>Jumlah Pengurus Kader Posyandu di Kabupaten Solok pada Tahun 2022 adalah 3071 Orang dan semua kader adalah perempuan</li> </ol> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Faktor Kesenjangan                      Minimnya informasi yang di dapat oleh lembaga Kemasyarakatan yang ada di Nagari Khususnya Posyandu mengenai kesetaraan gender.</li> <li>Penyebab Internal                     <ol style="list-style-type: none"> <li>Mindset masyarakat bahwa kegiatan Posyandu adalah kegiatannya untuk perempuan saja.</li> <li>belum dilakukannya sosialisasi mengenai kesetaraan gender dalam suatu lembaga.</li> </ol> </li> <li>Penyebab eksternal                      Kurangnya sarana informasi dan pengetahuan mengenai kesetaraan gender dalam lembaga baik di nagari, kecamatan dan kabupaten.                      Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait (lintas sektor)</li> </ol>
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<p>1. Tolak Ukur                      Membentuk kompetensi kepengurusan yang bagus berdasarkan kesetaraan gender dalam lembaga di Kabupaten, Kecamatan maupun Nagari.</p> <p>2. Indikator dan Target Kinerja                      Terlaksananya Pembinaan terhadap Kader Posyandu yang ada di Kabupaten Solok terlaksananya Monitoring dan Evaluasi lembaga Kemasyarakatan khususnya Posyandu Nagari di Kabupaten Solok</p>
<b>JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN</b>	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp. 165.000.000,-
<b>RENCANA AKSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Sosialisasi mengenai pentingnya kesetaraan gender di dalam lembaga PKK</li> <li>Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap kelembagaan Posyandu di Kabupaten Solok</li> <li>Melaksanakan sosialisasi kesetaraan gender terhadap kelembagaan Masyarakat khususnya Posyandu di Kabupaten Solok Rp. 165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)</li> </ol>

Arosuka, Maret 2023  
 Kepala,  
  
**ROMI HENDRAWAN, S.Sos, M.Si**  
 NIP. 19731106 199303 1 002

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	ISU GENDER		Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
				Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal				
Program Perlindungan Perempuan		- Dasar Hukum UUD Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	<b>Akses:</b>	-Masih kurangnya SDM yang berkualitas dan berkuantitas dalam penanganan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak	-Kurangnya dukungan keluarga/masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan	Peningkatan pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Sosialisasi dan advokasi kepada kecamatan terkait lembaga layanan Perempuan dan anak dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak	Terlaksananya Sosialisasi dan advokasi terhadap korban tindak kekerasan perempuan dan anak
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota		- UUD Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga	- Korban kekerasan merasa malu untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, dan masih mengangggab tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami merupakan masalah pribadi /aib	- Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait	- Kurangnya partisipasi tokoh masyarakat dalam mengawasi tindak kekerasan perempuan dan anak		Meningkatkan sarana dan prasarana dan media informasi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak.		<b>Input:</b> Rp. 95.000.000

<p>Sub. Kegiatan penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan di Kabupaten/Kota</p> <p>ujuan :          pelaksanaannya          perlindungan perempuan dan anak dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>	<p>- Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p>	<p>Masih kurangnya partisipasi korban untuk memanfaatkan lembaga layanan perempuan dan anak dari lingkungan sekitar terhadap tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak</p>	<p>-Kurangnya Sarana dan Prasarana dan media informasi tentang pencegahan tindak kekerasan Perempuan dan anak</p> <p>-Belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan pemahaman tentang fungsi dan keberadaan layanan pengaduan Perempuan dan anak</p>	<p>- Lokasi lembaga Layanan pengaduan jauh dari jangkauan korban tindak kekerasan Perempuan dan Anak</p>	<p>Penambahan SDM yang berkualitas dan berkuantitas dalam penanganan layanan terhadap Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan</p>	<p><b>Out put</b></p>	<p>Tersedianya layanan pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak dan perempuan korban kekerasan untuk 5 layanan</p> <p>Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait</p>
<p>- Perempuan dan anak rentan menjadi kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT)</p>	<p><b>Partisipasi</b></p>	<p>-Data korban kekerasan Perempuan dan anak masih banyak yang belum dilaporkan</p>					

<p>- Kasus tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak menurut data yang ada pada lembaga layanan perempuan dan anak :</p> <p>Tahun 2021 : Perempuan 18 dan anak 21</p> <p>Tahun 2022 : Perempuan 14 dan anak 26</p>	<p>Kontrol</p> <p>Belum semua Korban tindak kekerasan perempuan dan anak terlayani dan mendapat pendampingan</p>					<p>Outcome :</p> <p>Menurunnya tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak</p>
--	--	--	--	--	--	---

Koto Baru 3 April 2023  
 Kepala DPPKBP3A  
  
 dr. Maryeti Marwazi, Mars  
 NIP. 196710172002122001

## FORMAT GBS

### PERNYATAAN ANGGARAN GENDER ( GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : DINAS PPKB&P3A KABUPATEN SOLOK

TAHUN ANGGARAN : Tahun Anggaran 2024

Program	Program Perlindungan Perempuan
Kegiatan	Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/kota
Sub.Kegiatan	Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/Kota
Anggaran Sub.Kegiatan	Rp. 95.000.000
Hasil /Output	Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi perempuan korban kekerasan.
Analisis situasi	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <p>Perempuan dan anak rentan menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data korban kekerasan masih banyak yang belum dilaporkan pada lembaga Layanan Perempuan dan Anak. Kekerasan tersebut baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual yang dapat terjadi dimana saja, sehingga dapat menimbulkan penderitaan bagi perempuan dan anak.</p> <p>Kasus tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak menurut data yang ada pada lembaga Layanan Perempuan dan Anak adalah :</p> <p>Tahun 2018: Perempuan : 13 dan anak : 41  Tahun 2019: Perempuan : 18 dan anak : 21  Tahun 2020 : Perempuan : 14 dan anak : 26  Tahun 2021 : Perempuan : 14 dan Anak : 26  Tahun 2022 : Perempuan : 18 dan Anak : 21</p> <p>Adanya rasa malu/enggan korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang</p>

dialaminya karena masih menganggap masalah yang dialami merupakan masalah pribadi (aib), sehingga diperlukan kepedulian masyarakat sekitar agar penanganan kasus yang terjadi dapat terselesaikan. Menurut data yang ada pada lembaga Layanan Perempuan dan Anak, 90% kasus dilaporkan sendiri oleh korban, sedangkan 10% lagi laporan kasus dilaporkan oleh masyarakat/kader.

Untuk itu, perlu dilakukannya advokasi dan sosialisasi tentang lembaga Layanan Perempuan dan Anak kepada pihak pemerintah Kecamatan. Dari 14 Kecamatan yang telah dilakukan sosialisasi baru 6 Kecamatan yang telah mendapatkan sosialisasi. Untuk itu perlu dilakukannya sosialisasi lanjutan ke kecamatan lain yang ada di Kabupaten Solok.

## 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

### a. Faktor Kesenjangan

- Korban kekerasan merasa malu / enggan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Masih menganggap tindakan KDRT yg dialami merupakan masalah pribadi..
- Masih kurangnya partisipasi korban untuk memanfaatkan lembaga Layanan Perempuan dan Anak dan dukungan dari lingkungan sekitar terhadap tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak.
- Masih kurangnya partisipasi korban untuk memanfaatkan lembaga layanan perempuan dan anak dari lingkungan sekitar terhadap tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak.
- Belum semua korban tindak kekerasan perempuan dan anak terlayani dan mendapat pendampingan.

### b. Penyebab Internal

- Masih kurangnya SDM yang berkualitas dan berkuantitas dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak..
- Kurangnya koordinasi dengan Dinas terkait.
- Kurangnya sarana dan prasarana dan media informasi tentang pencegahan tindak kekerasan Perempuan dan anak.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum Optimalnya Sosialisasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan pemahaman tentang fungsi dan keberadaan Layanan Pengaduan perempuan dan anak.</li> </ul> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya dukungan keluarga/masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan.</li> <li>- Kurangnya partisipasi tokoh masyarakat dalam mengawasi tindak kekerasan perempuan dan anak.</li> <li>- Lokasi lembaga layanan pengadua jauh dari jangkauan korban tindak kekerasan perempuan dan anak.</li> </ul>	
<p>Rencana Aksi</p>	<p>Komponen 1</p>	<p>sosialisasi dan Advokasi kepada Kecamatan terkait lembaga layanan perempuan dan anak dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p>
		<p>Tujuan Meningkatkan pengetahuan masyarakat Kecamatan tentang lembaga Layanan Perempuan dan Anak</p>
	<p>Komponen 2</p>	<p>Meningkatkan sarana dan prasarana dan media informasi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>
		<p>Tujuan : Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengurus lembaga Layanan Perempuan dan Anak dalam penanganan dan pendampingan kasus</p>
	<p>Komponen 3</p>	<p>Penambahan SDM yang berkualitas dan berkuantitas dalam penanganan layanan terhadap korban tindak kekerasan</p>

		Tujuan : Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait (Polres, RSUD, psikolog, dll) tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Capaian Program	1.Indikator Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya layanan pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak dan perempuan korban kekerasan untuk 20 layanan.</li> <li>- Termanfaatkannya lembaga Layanan Perempuan dan Anak bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> </ul> <p>Indikator OUTCOME :</p> <p>Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>

Koto Baru, 3 April 2023

Kepala Dinas PPKBP3A



dr. Maryeti Marwazi.MARS

Nip. 19671017200212001

### Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

OPD : Sekretariat DPRD

PROGRAM : Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan atau Fungsi DPRD	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	ISU GENDER		RUMUSAN DAN RENCANA KEDEPAN	Rencana Aksi	PENGUKURAN HASIL	
			Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal			Reformulasi Tujuan	Indikator Kinerja
<p><b>Program : Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD</b></p> <p><b>Kegiatan :</b> Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</p> <p><b>Tujuan :</b> Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Raperda/Materi yang dibahas 3 Raperda</li> <li>- Jumlah DPRD yang membahas, Pr. 3 orang Lk. 32 orang.</li> <li>- Jumlah Sekretariat yang mendampingi Pr. 5 orang Lk. 10 orang</li> </ul>	<p><b>Akses :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesempatan/peluang bagi kaum perempuan dari berbagai bidang dipersulit karena budaya patriarki, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan Pendidikan.</li> </ul> <p><b>Partisipasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran serta perempuan dari berbagai bidang masih susah karena kesempatan bagi perempuan masih terbatas oleh sebab budaya patriarki.</li> </ul> <p><b>Kontrol :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus ada aturan/Undang-undang yang dapat memberi kesempatan/Peluang bagi kaum perempuan sama besar dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang.</li> </ul> <p><b>Manfaat :</b></p>	<p><b>Sebab Kesenjangan Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya pemahaman pengambil kebijakan terkait isu gender</li> <li>- Masih kurangnya SDM Aparatur yang merata secara gender</li> <li>- Masih Kurangnya sosialisasi tlg perencanaan yang responsif gender</li> <li>- Masih kurangnya koordinasi lintas sektor</li> </ul>	<p><b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih adanya anggapan di masyarakat bahwa perempuan makhluk lemah, emosional dan tidak tahan banting.</li> <li>- Budaya Patriarki yang masih hidup di masyarakat yang menelakan kaum laki-laki mempunyai prioritas yang lebih tinggi.</li> </ul>	<p><b>KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN</b></p> <p><b>Reformulasi Tujuan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan baik laki-laki maupun perempuan dalam pembahasan Raperda (Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD).</li> </ul>	<p><b>Rencana Aksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan koordinasi dengan pengambil kebijakan dan lintas sektor</li> <li>- Melakukan sosialisasi tlg PPRG baik di lingkungan internal maupun masyarakat.</li> </ul>	<p><b>Basis Data (Base-Line)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Raperda yang akan dibahas (3 tahun terakhir) sebanyak 12 Raperda</li> <li>- Rencana di Tahun 2024 Raperda yang akan dibahas sebanyak 3 Raperda.</li> </ul>	<p><b>Indikator Kinerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya Raperda sebanyak 3 Raperda dengan anggaran Rp.</li> <li>- Terlaksananya koordinasi dengan lintas sektoral</li> <li>- Terlaksananya Sosialisasi Lintas sektoral</li> </ul>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	ISU GENDER Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	KEBIJAKKAN DAN RENCANA KEDEPAN Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	PENGUKURAN HASIL Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		Aturan kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang profesional / berkeadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bidang.						

Arsipika K.A. Maret 2023  
 PEMERINTAH KABUPATEN SOLO  
 SEKRETARIS DPRD  
**SETWAKD**  
 Drs. ZAITUL IKHLAS, A.P. MSI  
 NIP. 19731125199402 1 001  
 SOLO

**GENDER BUDGET STATEMENT  
(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)**

PROGRAM	DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
KEGIATAN	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
KODE REKENING	4.02.02.2.01.02
Analisis Situasi	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Ranperda yang dibahas sebanyak 3 Ranperda</li> <li>- Jumlah Anggota DPRD yang membahas, Perempuan 3 orang dan laki-laki 32 orang.</li> <li>- Jumlah Sekretariat yang mendampingi, perempuan sebanyak 5 orang dan laki-laki 10 orang.</li> </ul> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses : Kesempatan/peluang bagi kaum perempuan dari berbagai bidang dipersulit karena budaya patriaki, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan Pendidikan</li> <li>- Partisipasi : Peran serta perempuan dari berbagai bidang masih susah karena kesempatan bagi perempuan masih terbatas oleh sebab budaya patriaki.</li> <li>- Kontrol : Harus ada aturan/Undang-undang yang dapat memberi kesempatan/Peluang bagi kaum perempuan sama besar dengan kaum laki – laki dalam berbagai bidang.</li> <li>- Manfaat : Aturan kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang profesional / berkeadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bidang.</li> </ul> <p>3. Penyebab Kesenjangan Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih Kurangnya pemahaman pengambil kebijakan terkait isu gender</li> <li>- Masih kurangnya SDM Aparatur yang merata secara gender</li> <li>- Masih Kurangnya sosialisasi ttg perencanaan yang responsif gender</li> <li>- Masih kurangnya koordinasi lintas sektor</li> </ul> <p>4. Penyebab Kesenjangan Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih adanya anggapan di masyarakat bahwa perempuan makhluk lemah, emosional dan tidak tahan banting.</li> <li>- Budaya Patriaki yang masih hidup di masyarakat yang menetapkan kaum laki-laki mempunyai prioritas yang lebih tinggi.</li> </ul>
Capaian Program	1. Tolak Ukur : Terlaksananya pembahasan yang tepat waktu
	2. Indikator dan Target Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Jumlah Anggaran Program/Kegiatan	Rp. 195.630.000,-
Rencana Aksi	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 3 Dokumen Hasil : Jumlah Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda sebanyak 3 Perda
	<p>Arosuka, Maret 2023</p> <p><b>SEKRETARIS DPRD</b></p>  <p>Drs. ZAITUL IKLAS, AP, M.Si NIP. 19731125 199402 1 001</p>

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)  
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
 KABUPATEN SOLOK

Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender: Keternakitan Laki-laki dalam peningkatan kesadaran masyarakat akan rumah sehat dan layak huni			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data	Indikator Kerja
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN  Kegiatan:	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah sehat dan layak huni	Akses: Sebagian masyarakat belum memahami tentang rumah sehat dan layak huni  Sebagian masyarakat belum memahami tentang pentingnya kesadaran hukum kepemilikan rumah	Kapasitas SDM yang kurang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat  Data dari dinas akan rumah layak huni belum valid dan update	Masyarakat yang kurang mengerti akan pentingnya rumah sehat dan layak huni	Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi mengenai mewujudkan rumah sehat dan layak huni	Mengadakan pembinaan atau sosialisasi  Pemberian informasi melalui media sosial/internet  Melengkapi sarana dan prasarana untuk mewujudkan rumah sehat dan layak huni	Jumlah masyarakat yang ikut berperan aktif dalam pembinaan dan sosialisasi dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya rumah sehat dan layak huni  Input: Rp. 50.000.000,-

<p>Peringatan dan Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</p>	<p>Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengetahui dan mengikuti</p>	<p>Partisipasi: Perempuan lebih aktif dalam mewujudkan rumah yang sehat dan layak huni</p>	<p>Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mewujudkan rumah sehat dan layak huni</p>	<p>Kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk mengetahui dan mengikuti informasi tersebut</p>		<p>Output: Terlaksananya Pembinaan terhadap masyarakat akan pentingnya rumah sehat dan layak huni</p>
	<p>Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum tentang kepemilikan rumah</p>		<p>Keterbatasan sarana dan prasarana untuk rumah layak huni yang memiliki kekuatan hukum atas kepemilikan rumah</p>	<p>Kurangnya kepedulian masyarakat akan pentingnya mewujudkan rumah sehat dan layak huni yang memiliki kekuatan hukum atas kepemilikan rumah</p>		

<p><b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah</p> <p><b>Tujuan:</b> Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa perlunya kesetaraan Gender dalam peningkatan kesadaran akan pentingnya mewujudkan rumah sehat dan layak huni</p>	<p>Kegiatan oleh dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten solok</p> <p>Jumlah masyarakat laki-laki dan perempuan yang sadar akan pentingnya rumah yang sehat dan layak huni</p>						<p><b>Outcome:</b> Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan keterampilan Laki-Laki dan perempuan pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah sehat dan layak huni</p> <p>2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap partisipasi masyarakat dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni</p>
					<p><b>Output:</b> Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan keterampilan Laki-Laki dan perempuan</p>		<p><b>input:</b> Rp. 50.000.000,-</p>

Arosuka, 29 Maret 2023  
Kepala Dinas PKKPP,  
  
RETNY HUMALIA, ST  
NIP. 19798062000032002

## GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

**NAMA OPD** : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
**KABUPATEN SOLOK**  
**TAHUN** : 2024

Program	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Kegiatan	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Sub Kegiatan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
Anggaran	Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
Output Kegiatan	Terlaksananya peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah
Analisis Situasi	Kurangnya kesadaran masyarakat (laki-laki dan perempuan) akan pentingnya rumah sehat dan layak huni
TAHUN	Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
Program	Akses :
Kegiatan	Sebagian masyarakat belum memahami tentang rumah sehat dan layak huni
Sub Kegiatan	Peran :
	Perempuan lebih aktif dalam mewujudkan rumah yang sehat dan layak huni
Anggaran	Kontrol :
Indikator Kegiatan	Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya rumah sehat dan layak huni
Output Kegiatan	Penyebab Internal :
Analisis	1. Kapasitas SDM yang kurang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat
	2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mewujudkan rumah sehat dan layak huni
	3. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk rumah layak huni yang memiliki kekuatan hukum atas kepemilikan rumah
	Penyebab Eksternal :
	1. Data dari dinas akan rumah layak huni belum valid dan update
Rencana Aksi	1. Mengadakan pembinaan atau sosialisasi 2. Pemberian informasi melalui media sosial/Internet 3. Melengkapi sarana dan prasarana untuk mewujudkan rumah sehat dan layak huni
Alokasi Anggaran	Rp. 50.000.000,-
Dampak	Adanya kesetaraan gender dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni

Arosuka, 20 Maret 2023

Kepala Dinas PRKPP,

  
 RETNY HUMAIRA, ST  
 NIP. 19770306 200003 2 002

Rencana

**MATRIX GENDER ANALYSIS PATHWAYS (GAP)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOLOK  
TAHUN 2024**

NAMA KEBIJAKAN / PROGRAM / KEGIATAN	LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	PENGUKURAN			
										FAKTOR KESEJANGKAPAN	ISU GENDER INTERNAL	SEBAB KESEJANGKAPAN INTERNAL
<b>Program:</b> 1 Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan 1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan 1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah - Review PPRG, Monev PPRG Tujuan	1 Mengetahui apakah PPRG dilaksanakan sesuai standar atau aturan	1 Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan	Akses: APiP berperan melakukan Review dan Monev PPRG guna memberi keyakinan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh OPD telah responsif gender	1 APiP belum mendapatkan pelatihan / Bimbingan Teknis terkait pelaksanaan Review PPRG	1 Masih kurangnya pemahaman serta rendahnya komitmen OPD dalam pengarusutamaan gender dalam proses penganggaran	1 Terjadinya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada masing-masing OPD di Kabupaten Solok	1 Pelaksanaan Review dan Monev PPRG terhadap 17 OPD	Ketersediaan personil dan anggaran di Inspektorat Daerah untuk pelaksanaan review , Monev PPRG dan peningkatan kapasitas APiP dalam melaksanakan review PPRG				
									2 Permen P3A No. 10 Tahun 2004 terkait dengan pengawasan dan evaluasi PPRG menyatakan bahwa Inspektorat berperan melakukan pengawasan PPRG	2 Keterbatasan personil, waktu dan anggaran dalam pelaksanaan review dan Monev	2 Penyusunan GAP dan GBS belum dianggap sebagai kebutuhan tapi masih sebatas pemenuhan laporan	2 Terjadinya peningkatan pemahaman dan kompetensi APiP dalam melaksanakan review dan monev PPRG
									3 Pemeriksaan belum menyentuh terhadap substansi pelaksanaan PPRG pada masing-masing sub kegiatan yang tercantum di GAP dan GBS	3 Persepsi bahwa PPRG hanya menjadi kepentingan OPD yang menanggapi urusan gender	2 Melaksanakan konsultasi / sharing informasi tentang PPRG	
3 Mengidentifikasi hal-hal penting bagi tindak lanjut atau pengembangan kebijakan dimasa yang akan datang	4 Sasaran pengawasan PPRG adalah sebanyak 26 OPD	Manfaat: Didapatkan rekomendasi pelaksanaan PPRG sesuai standar yang diharapkan pada masing-masing OPD										

PROGRAM /	LANGKAH 2		LANGKAH 3		LANGKAH 4		REVISI	
	DATA PEMBUKA WAWASAN	FAKTOR KESEMUANGAN	ISU GENDER SEBAB KESEMUANGAN INTERNAL	SEBAB KESEMUANGAN EKSTERNAL	KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASIS DATA	PENGUKURAN HASIL INDIKATOR KINERJA
<p>menentukan kapasitas bagi pektektor a lebih modatif tinggan</p> <p>kesempatan APiP untuk ngkatan</p> <p>kesulitan an untuk apasitas</p>	<p>1 Untuk meningkatkan kualitas pengawasan bagi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta pemahaman terhadap regulasi yang terus berkembang dan bersifat dinamis, perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi APiP Inspektorat daerah secara berkala</p> <p>2 Setiap APiP berkepentingan mengikuti kegiatan peningkatan kapabilitas APiP</p>	<p>Akses: Masing-masing APiP memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapabilitas</p> <p>Partisipasi: APiP perempuan biasanya kesulitan dalam mengikuti bimbingan teknis / diklat</p> <p>Perempuan rumah selama sehari-hari dengan pertimbangan keluarga.</p> <p>Kontrol: Perlu ditetapkan suatu mekanisme agar terjadi pemerataan kesempatan dan kemudahan bagi perempuan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapabilitas</p> <p>Manfaat: Terjadinya pemerataan kesempatan dan terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapabilitas APiP</p>	<p>Perempuan sebagaimana kodratnya sebagai ibu, sangat berperan dan berfungsi dalam sebuah rumah tangga, pelaksanaan diklat/bimtek diluar kantor selama sehari-hari mengganggu keluarga akan mengganggu peran dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga</p>	<p>Pelaksanaan Diklat/Bimtek umumnya dilaksanakan diluar kota sehingga mengharuskan peserta meninggalkan rumah untuk beberapa waktu</p>	<p>Perlu melaksanakan suatu mekanisme peningkatan kapasitas APiP dengan memperluas kesempatan bagi peserta serta kemudahan bagi perempuan untuk mengikuti Diklat / Bimtek dengan tidak teralau mengganggu peran dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga</p>	<p>Mengendalikan secara berkala pelaksanaan pelatihan kantor mandiri bertokasi dikantor sendiri dengan memperluas kepesertaan secara merata</p>	<p>Ketersediaan anggaran dan kegiatan pendukung untuk pelaksanaan pelatihan mandiri di kantor sendiri</p>	<p>Terlaksananya pelatihan mandiri di kantor sendiri secara berkala</p>

**(GENDER BUDGET STATEMENT)  
INSPEKTORAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>PROGRAM</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>
<b>KODE PROGRAM</b>	6.01.02
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p>1 Inspektorat dalam menjalankan fungsinya berkewajiban melakukan Review dan Monev terhadap PPRG guna memberi keyakinan bahwa OPD telah melakukan proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.</p> <p>2 Guna terselenggaranya Review dan Monev PPRG yang berkualitas perlu ditingkatkan dan pemerataan kemampuan APIP dalam melaksanakan Review dan Monev PPRG.</p> <p>3 Dalam upaya peningkatan kapasitas bagi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dilingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Solok, APIP perempuan merasa kesulitan untuk mengikuti Bimtek / Diklat yang dilaksanakan diluar kantor selama sehari-hari.</p> <p>Isu dan Faktor Kesenjangan gender</p> <p>1 PPRG belum dilaksanakan secara baik sesuai standar yang diharapkan oleh masing-masing OPD.</p> <p>2 APIP perempuan merasa kesulitan mengikuti diklat/bimtek jika dilaksanakan diluar kota yang mengharuskan mereka meninggalkan keluarga untuk beberapa waktu.</p>
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<p>Tolok Ukur</p> <p>1. Terlaksananya Review dan Monev PPRG.</p> <p>2. Pelaksanaan Pelatihan Mandiri di Kantor Sendiri secara berkala.</p> <p>Indikator dan target Kinerja</p> <p>1. Terlaksananya review dan Monev PPRG bagi 17 OPD sampel/</p> <p>2. Terlaksananya minimal 4 kali Pelatihan Mandiri di Kantor Sendiri</p>
<b>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</b>	Rp. 74. 678.330,- (Tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)
<b>RENCANA AKSI</b>	<p>Sub Kegiatan 1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Masukan : Dana, Rp. 26.790.000,- Keluaran : 1 Review PPRG (33 OHP @150.000 = Rp. 4.950.000) 2 Monev PPRG (4 x 33 OHP @ 150.000 = Rp. 19.800.000,- 3 Konsultasi / Sharing informasi (6 OH @340.000) = Rp. 2.040.000 Hasil : Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah</p> <p>Sub Kegiatan 2 Kerjasama Pengawasan Internal Masukan Dana, Rp. 14.000.000,- Keluaran 3 Kali Pelatihan Mandiri di Kantor Sendiri a Bahan cetak Rp 800.000 b Makan Minum Rp 2.400.000 c Honor Narasumber, Rp 10.800.000 Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP</p>

Arosuka, 16 Maret 2023  
INSPEKTUR DAERAH



**MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SOLOK**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja / Data Dasar (Base Line)	Indikator Kinerja
<p><b>Program :</b>  <b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b></p> <p><b>Kegiatan :</b>  <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b></p>	<p>1. Pada Tahun 2021 dilaksanakan kegiatan Pembinaan Bela Negara yang akan diikuti oleh generasi muda/perangkat desa/tokoh pemuda dan ormas, sebanyak 100 orang peserta, terdiri dari 80 orang laki-laki dan 20 orang perempuan</p> <p>2. Pada Tahun 2022 dilaksanakan kegiatan Pembinaan bela negara yang diikuti oleh 80 Peserta, terdiri dari 62 orang laki-laki dan 18 orang perempuan</p>	<p>Dari kegiatan pembinaan bela negara ditemukan adanya faktor kesenjangan:</p> <p><b>Akses:</b> Belum terbuka kesempatan untuk perempuan ikut dalam usaha bela negara (Belum tersusunnya strategi penguatan bela negara melalui kegiatan dan penganggaran)</p>	<p>1. Belum tersusunnya strategi (Juknis) penguatan bela negara melalui kegiatan dan penganggaran</p> <p>2. Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam melaksanakan Pembinaan Bela Negara yang Responsive Gender</p> <p>3. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Tim Pembina / Kendaraan Roda 2</p>	<p>1. Terbatasnya pemahaman masyarakat bahwa laki laki dan perempuan mempunyai kewajiban yang sama dalam usaha bela negara</p> <p>2. Masih kurangnya minat perempuan dalam melaksanakan Pembinaan Bela Negara yang Responsive Gender</p>	<p>Mewujudkan kegiatan usaha bela negara bagi seluruh lapisan masyarakat (generasi muda dan ormas)</p>	<p>Pembinaan Bela Negara</p> <p>1. Melaksanakan Pembinaan dan penyuluhan</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasibaik di intern maupun ke masyarakat</p> <p>3. membuat juknis</p> <p>4. Pengadaan Kendaraan roda 2 bagi tim pembina bela negara</p> <p>5. Meningkatkan kapasitas SDM Tim Pembina dan menambah jumlah tim pembina</p> <p>6. Rapat koordinasi dengan lintas sektor</p>	<p>1. Jumlah anggota yang ikut pelaksanaan kegiatan Pembinaan Bela Negara pada tahun 2023 sebanyak 300 orang peserta, terdiri dari 200 orang laki-laki dan 100 orang perempuan</p> <p><b>Output :</b>                      Terlaksananya Pembinaan Bela Negara yang Responsive Gender</p>	<p><b>Rumusan Kinerja :</b></p> <p>1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Bela Negara</p> <p>2. Terlaksananya evaluasi kegiatan Pembinaan Bela Negara</p> <p><b>Indikator Kinerja :</b></p> <p>1. Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Bela Negara sebanyak 300 orang</p> <p>2. Tersedianya dokumen untuk evaluasi Pembinaan Bela Negara</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja / Data Dasar (Base Line)	Indikator Kinerja
<p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (sasaran)</p>		<p><b>Partisipasi :</b> Rendahnya keinginan Generasi Muda (Perempuan) untuk ikut terlibat dalam usaha kegiatan bela negara</p> <p><b>Kontrol :</b> Belum adanya pembagian kuota bagi peserta laki-laki dan Perempuan</p> <p><b>Manfaat :</b> Tidak terdapat kesenjangan</p>	<p>4. Masih Kurangnya Sarana Informasi tentang Bela Negara</p> <p>5. Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektor</p>					<p>Outcome : Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya bela negara</p> <p>Jumlah Anggaran Program = Rp. 34.425.000</p>

Arosuka,        Maret 2023  
**KEPALA**  
**BADAN**  
**KESATUAN BANGSA DAN**  
**KEPERTAHAN**  
**AGUS ROSTAMDA SH., MM.**  
 Pembina TK.1 (IV.b)  
 NIP.19650805 199308 1 001





<p><b>gender</b></p> <p><b>SASARAN:</b> Masyarakat Pelaku Perekraf</p>	<p>sejumlah 40 Orang, dimana 30 orang laki-laki, dan hanya 10 orang perempuan</p> <p>3. Data Jumlah objek wisata yang aktif: 49 objek wisata</p> <p>4. Pelaku Perekraf yg ada di Kab. Solok yaitu sekitar 200 orang</p>	<p>Perempunan dalam Kepengurusan Perekraf Dalam hal pengambilan keputusan laki-laki memiliki kontrol yang lebih luas.</p> <p><b>Manfaat:</b> Masyarakat belum dapat merasakan Peran perempunan di Tim Perekraf.</p>	<p>dengan SKPD terkait (Lintas Sektor)</p> <p>▪ Kurangnya sarana informasi baik offline maupun online(brosur,ba liho, medsos, vidio tron, dll )tentang kepariwisataan kab. solok</p>	<p>warga sekitar kawasan wisata sebagai pelaku Perekraf terutama perempunan</p>		<p>• Tersedianya sarana prasarana yang responsive gender</p> <p>• Sosialisasi Terhadap pelaku perekrtaf perempunan sesuai Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no 11 PM 17/PR.001/MK P/2008 tentang sadar wisata</p>		
--	---	---	--	---	--	---	--	--

**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. SOLOK**

PLT. KEPALA DINAS



**Drs. M. ALFAJRI**

Nip. 19700602 198902 1 001

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
( GENDER BUDGET STATEMENT)**

<b>SKPD</b>	<b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>2024</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif</b>
<b>KODE PROGRAM</b>	<b>3.26.05</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</b>
<b>SUB- KEGIATAN</b>	<b>Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.</b>
<b>ANGGARAN SUB - KEGIATAN</b>	Rp. 99.994.810
<b>HASIL/OUTPUT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya bimbingan teknis bagi pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf)</li> <li>- Terlaksananya Pembinaan dan koordinasi dengan pelaku Parekraf</li> </ul>
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p>a. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) :</p> <p>Data Yang Dibutuhkan :</p> <p>b. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024</p> <p>c. Data jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas Pelaku Parekraf yaitu sejumlah 40 Orang, diantaranya laki-laki 80% namun perempuan hanya 20%</p> <p>d. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p><b>Kesenjangan Akses :</b></p> <p>e. Akses jalan menuju objek wisata rawan bagi perempuan</p> <p><b>Kesenjangan Partisipasi, yaitu :</b></p> <p>f. keikutsertaan kaum perempuan dalam kepengurusan parekraf masih rendah,kebanyakan perempuan berpartisipasi sebagai pelaku industry seperti kuliner dan kerajinan</p> <p><b>Kesenjangan Kontrol :</b></p> <p>g. Masih adanya kesenjangan peran laki-laki dan Perempuan dalam Parekraf dan dalam hal pengambilan keputusan laki-laki memiliki kontrol yang lebih luas.</p> <p><b>Kesenjangan Manfaat :</b></p> <p>h. Masyarakat belum dapat merasakan Peran perempuan di kelompok Parekraf</p> <p><b>i. Penyebab Internal :</b></p> <p>j. Masih belum adanya juknis yang jelas bagi pelaku Parekraf</p> <p>k. Masih kurangnya kualitas SDM dalam hal kepariwisataan</p> <p>l. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk pengembangan pelaku Parekraf</p> <p>m. Kurangnya sosialisasi untuk mengajak para pelaku Parekraf agar mengikuti pelatihan/Bimbingan teknis.</p> <p>n. Kurang koordinasi dan pembinaan terhadap pelaku Parekraf</p> <p>o. Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait (Lintas Sektor)</p> <p>p. Kurangnya sarana informasi baik offline maupun online(brosur,baliho, medsos, vidio tron, dll )tentang kepariwisataan kab. Solok</p>

	<b>b. bab Eksternal :</b> q. Masih terbatasnya minat investor dalam mengembangkan objek wisata r. Kurangnya sarana dan parasarana disekitar Kawasan objek wisata. s. Kurangnya dukungan keluarga bagi pelaku Parekraf perempuan karena alasan keamanan, lokasi wisata, dan sebagainya t. Kurangnya keterlibatan warga sekitar kawasan wisata sebagai pelaku Parekraf		
<b>PERENCANAAN KEGIATAN</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Tujuan</b>	Meningkatkan kapasitas SDM Pariwisata demi terwujudnya responsive geder
		<b>Aktifitas</b>	1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata melalui bimtek pelaku Parekraf 2. Sosialisasi tentang Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no 11 PM 17/PR.001/MKP/08 tentang sadar wisata 3. Pembinaan dan koordinasi dengan pelaku Parekraf
		<b>Sumberdaya (Output)</b>	Dana: Rp.99.994.810
			Panitia: Disparbud
			Peserta : Pelaku Parekraf
			Saran Prasarana : ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak dan Bahan Komputer
		<b>Outcome</b>	<b>Rumusan kinerja</b> Meningkatnya pengembangan Sumber daya manusia pelaku Parekraf di Kabupaten Solok  <b>Indikator Kinerja</b> Jumlah Peserta bimtek yang memiliki GAP dan GBS pada lampiran rencana kerja

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
**PLT. KEPALA DINAS**  
  
**Drs. M. ALFAJRI**  
**Nip. 19700602 198902 1 001**



## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN SOLOK

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<p><b>Program :</b> Program Kelola Budidaya Ikan</p> <p><b>Kegiatan :</b> Pengembangan budidaya ikan</p> <p><b>Uraian :</b> Budidaya ikan</p> <p><b>Output :</b> Budidaya ikan</p> <p><b>Indikator Kinerja :</b> Budidaya ikan</p>	<p><b>Data Pembuka Wawasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 49 Tahun 2014 tentang usaha pembudidayaan ikan</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik</li> <li>Masih banyaknya pelaku budidaya yang belum memperoleh sertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) / CPIB (Cara Penanganan Ikan yang Baik)</li> </ul> <p><b>Pelaku usaha perikanan tahun 2022 :</b> 2.069 Laki laki : 1679 Perempuan : 390</p> <p><b>Data penyuluh perikanan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6 orang pus</li> <li>2 orang penyuluh pembantu</li> </ul>	<p><b>Data</b></p> <p><b>Faktor Kesenjangan</b></p> <p><b>Akses :</b> Bentuk kerja yang lebih memerlukan tenaga</p> <p><b>Partisipasi :</b> Belum merata kesempatan kerja bagi perempuan dibandingkan laki-laki</p> <p><b>Kontrol :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> <p><b>Manfaat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kompetensi dan keahlian pelaku usaha perikanan dan meningkatkan jumlah produksi</li> </ul>	<p><b>Sebab Kesenjangan Internal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya Kualitas dan Kuantitas pelaku usaha perikanan</li> </ol> <p><b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya norma sosial yang melarang perempuan bekerja di tempat tertentu.</li> </ol>	<p><b>Reformulasi Tujuan</b></p> <p>Meningkatnya kualitas SDM pembudidayaan dalam Cara Budidaya dan Pembenihan Ikan yang Baik / Cara Penanganan Ikan yang Baik, baik itu bagi pembudidayaan laki-laki</p>	<p><b>Rencana Aksi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dan Memberikan penyuluhan bagaimana dan apa itu CBIB/CPIB</li> <li>Mendata jumlah pembudidayaan ikan dalam upaya meratakan kesempatan kerja bagi perempuan dan laki-laki</li> <li>Mencukupi sarana dan prasarana yang dibutuhkan</li> <li>Intensifikasi penyuluhan yang diberikan kepada kelompok perikanan, baik secara langsung atau melalui media</li> </ol>	<p><b>Data Dasar</b></p> <p>Jumlah Partisipasi pelaku usaha perikanan : <b>Laki? : 81,15%</b> <b>Perempuan? : 18,85%</b></p> <p><b>Pelaku Perikanan yang mempunyai sertifikat CBIB :</b> 8 orang CBIB 3 orang CPIB (semua laki-laki)</p>	<p><b>Monitoring</b></p> <p>Pelaksanaan pelatihan serta pembinaan terhadap pembudidayaan Ikan Input : Rp.23.999.730,- Output : Terlaksananya pembinaan pembudidayaan ikan yang di latih dan di berikan informasi sebanyak 16 orang</p> <p><b>Outcome :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdatanya jumlah pembudidayaan yang bersertifikat CBIB/CPIB di kabupaten Solok</li> <li>Tersebarannya informasi produksi perikanan yang bersertifikat CBIB/CPIB</li> </ul>	

<p><b>Pelaku Perikanan yang mempunyai sertifikasi CBIB :</b>        8 orang CBIB        3 orang CPIB        (semua laki-laki)</p>	<p>yang berkualitas dari segi bermutu tinggi.</p>	<p>5 masih belum optimalnya penyuluhan dari dinas terkait        6. Masih kurangnya penyuluh perikanan        7 belum ada juknis terkait pembenihan ikan yang baik</p>			<p>5. Pengusulan penambahan penyuluh yang mencukupi untuk kebutuhan dinas        6. Pengusulan dan penerbitan juknis yang berkaitan dengan pembenihan yang baik dan cara pembudidayaan yang baik</p>		
---	---	--	--	--	--	--	--

Koto Baru, 14 Maret 2023  
 Plh. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan

  
**IMRAN SYAHRIAL, SP**  
 NIP. 19681012199031006

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) : DINAS PERIKANAN DAN PANGAN : 2023.	
SKPD	
TAHUN ANGGARAN	
PROGRAM	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
KODE PROGRAM	3.25.3.25.2.09.0.00.03.0004
KEGIATAN	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
SUB KEGIATAN	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya ikan Kecil
ANGGARAN SUB KEGIATAN	Rp 23.999.730
HASIL/OUTPUT	Meningkatnya Kualitas SDM Pembudidaya ikan dalam cara Budidaya dan Pembenihan Ikan yang Baik
ANALISIS SITUASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</b></li> <li>• PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN</li> <li>• PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;"><b>Jumlah Pembudidaya tahun 2022 : 2.069</b>            Laki laki : 1679            Perempuan : 390</p> <p style="margin-left: 40px;"><b>Data penyuluh perikanan :</b>            6 orang pns            2 orang penyuluh pembantu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Faktor Kesenjangan</b>                Akses : Bentuk kerja yang lebih memerlukan tenaga                Partisipasi : Belum merata Kesempatan dan kepercayaan bagi perempuan dibandingkan laki-laki                Manfaat : Meningkatnya kompetensi dan keahlian pelaku usaha perikanan dan meningkatnya jumlah produksi yang berkualitas dan bermutu tinggi</li> <li>b. <b>Penyebab Internal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya Kualitas dan Kuantitas pelaku usaha perikanan</li> <li>• Kurangnya Sarana dan Prasarana yang representatif</li> <li>• Kurangnya koordinasi ke kelompok perikanan (pelaku usaha perikanan)</li> <li>• Kurangnya sosialisasi dan informasi ke kelompok perikanan                    masih belum optimalnya penyuluhan dari dinas terkait                    Masih kurangnya penyuluh perikanan</li> <li>• belum ada juknis terkait pembenihan ikan yang baik</li> </ul> </li> <li>a. <b>Penyebab Eksternal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya norma sosial yang melarang perempuan bekerja di tempat tertentu.</li> <li>• Belum maksimalnya dorongan orang tua, keluarga dan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

	tokoh masyarakat		
<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Komponen 1</b>	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdatanya jumlah pembudidaya yang bersertifikat CBIB/CPIB di kabupaten Solok</li> <li>• Tersebar nya informasi produksi perikanan yang bersertifikat CBIB/CPIB</li> </ul>
		Alokasi Anggaran	Rp. 23.999.730
	<b>Total anggaran</b>		Rp. 23.999.730
<b>CAPAIAN PROGRAM</b> (di level kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Kompetensi dan keahlian pelaku usaha budidaya</li> <li>• Meningkatnya jumlah produksi yang berkualitas dan bermutu tinggi.</li> </ul>		

Koto Baru, 14 Maret 2023  
Plh. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan

  
**IMRAN SYAHRIAL, SP**  
 NIP. 19681012199031006

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9			
KEBLIAKAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBLIAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL				
		FAKTOR KESEJANGKAN	SEBAB INTERNAL	SEBAB EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASE-LINE DATA	INDIKATOR KINERJA			
Program Pembangunan Jalan	Surat Edaran 4 Menteri: No.270/M PPN/11/2012 No. SE 33/MK.02/2012 No. 050/4379A/2012., No. SE-46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).	<b>Akses :</b> Masih Belum optimalnya akses jalan yang memadai, aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat	1. Belum adanya infrastruktur jalan yang memadai, aman dan responsif gender bagi semua kalangan masyarakat	1. Masih rendahnya peran tokoh masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan untuk menunjang akses mobilitas bagi seluruh lapisan masyarakat yang responsif gender	1. Pembangunan jalan yang responsif gender	Pada Tahun 2021 angka kematian bayi 3-4 orang bayi. Kecelakaan 2 -3 orang. Pindahkan ke data base	1. Pembangunan jalan yang responsif gender Jalan Muaro sabie aia - garabak Input : 5.477.966.996 Outcome : 5 km Panjang jalan terbangun yang responsif gender untuk mobilisasi seluruh lapisan masyarakat			
	Surat Edaran Menteri PU Nomor : 13/SE/M/2013 tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender. Permen PU No. 9 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan	<b>Partisipasi :</b> Untuk pembangunan jalan partisipasi laki laki lebih dominan ( 95%) dibandingkan perempuan (5%). Masih minimnya pasrtisipasi kaum wanita dalam menyuarakan perencanaan pembangunan jalan (P=20%) (I=80%)	2. Belum dilaksanakannya Sosialisasi permen pu yang responsif gender	2. Rendahnya swadaya masyarakat dalam pemeliharaan infrastuktur					2. Sosialisasi permen pu yang responsif gender	Jumlah KK : 608 KK (2252 Jiwa, yang terdiri dari : (L : 1163, P : 1089 ) Panjang jalan yang dibutuhkan 5 km	2. Jumlah sosialisasi yang memahamii tentang permen PU terkait infrastruktur yang responsif gender (P=30%) (I=70%)
	Jumlah KK : 608 KK (2252 Jiwa, yang terdiri dari : L : 1163, P : 1089 ) Pada Tahun 2021 angka kematian bayi 3-4 orang bayi. Kecelakaan 2 -3 orang. Pindahkan ke data base	<b>Kontrol :</b> Belum Terakomodirnya seluruh aspirasi masyarakat akan pembangunan infrastruktur jalan dalam terealisasikan sesuai kebutuhan (tuntas)	3. Belum adanya Juknis tentang pembangunan sarana, prasarana, pembangunan jalan dan jembatan yang responsif gender	3. Akses daerah yang sangat jauh sehingga sulit dijangkau oleh tim					Jalan Kondisi Sedang (0,67Km) Jalan Kondisi Rusak Ringan (1,250 Km) Jalan Kondisi Rusak Berat (11.58 Km)	Input : 30.000.000 output: Jumlah peserta sosialisasi yang memahami pembangunan yang responsif gender Outcome : peningkatan pemahaman tentang pembangunan yang responsif gender	
Kegiatan : Peningkatan Pelaksanaan Rehabilitasi Jalan muaro sabie aia - garabak	Panjang jalan yang dibutuhkan 13,5 km Jalan Kondisi baik ( 0 Km ) Jalan Kondisi Sedang (0,67Km) Jalan Kondisi Rusak Ringan (1,250 Km) Jalan Kondisi Rusak Berat (11.58 Km)	<b>Manfaat :</b> Belum termanfaatkannya dengan baik infrastruktur jalan secara optimal karena tidak tuntasnya pembangunan infrastruktur	4. Proses Perencanaan yang belum memahami konsep gender secara maksimal	4. Letak geografis daerah kab. solok yang berada pada daerah rawan akan bencana	3. Penyusunan Juknis tentang pembangunan sarana, prasarana, pembangunan jalan dan jembatan yang responsif gender	3. Penyusunan Juknis tentang pembangunan sarana, prasarana, pembangunan jalan dan jembatan yang responsif gender	Input : Rp. 20.000.000.- Output: Jumlah Juknis yang tersusun Outcome : 95 % pemahaman pembangunan jalan dan jembatan				
		5 Kurangnya Pemahaman tim survei, konsultan, dan tenaga pengawas tentang jalan yang responsif gender		4. Sosialisasi juknis terhadap pembangunan jalan yang responsif gender bagi perencana, tim survei, tenaga pengawas, dan masyarakat							
		6. Belum Optimalnya koordinasi dengan OPD terkait dan lintas sector									



**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN
TUJUAN	Meningkatkan ketersediaan akses jalan yang aman dan nyaman pada jalan muaro-garabak yang dapat digunakan bagi seluruh lapisan masyarakat (laki-laki, perempuan, lansia, anak-anak, dan kaum disabilitas)
KEGIATAN	Peningkatan Pelaksanaan Rehabilitasi Jalan muaro sabia aia - garabak
KODE KEGIATAN	1.03.10.2.01.05
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <p>Pembangunan infrastruktur mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Peningkatan perekonomian tersebut didukung dengan sarana prasana yang baik. Salah satu infrastruktur jalan yang belum layak dalam pembangunannya adalah pembangunan jalan pada muaro-garabak, Berdasarkan data yang ada, Panjang jalan yang dibutuhkan adalah sepanjang 13,5 km, dengan jalan kondisi baik sepanjang 0 km dan jalan kondisi sedang sepanjang 0,67 km. jalan kondisi rusak ringan 1,250 km dan dalam kondisi rusak berat 11,58 km.</p> <p>Dari data diatas jalan yang dapat dilalii hanya 0,8%, dengan sisa 99,2 % jalan muaro-garabak tidak bisa dilalui. Maka pembangunan yang berkelanjutan daan kesesuai dengan kaidah responsif gender belum bisa dirasakan pada masyrakat yang melalui jalan muaro-garabak.</p> <p>Jalan muaro-garabak terdapat jumlah Kepala Keluarga yang terdiri 965 KK penduduk berjumlah 1637 jiwa yang terdiri dari laki-laki 789 orang dan perempuan 839 orang.</p> <p>2. Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>Pembangunan jalan muaro-garabak dalam rangka untuk memudahkan aksesibilitas dan mobilisasi seluruh lapisan masyarakat belum terlaksana secara optimal pada jalan muaro-garabak. Pada saat pembangunan infrastrukturnya, terdapat masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan karena beban kerja pekerjaan tersebut belum bisa dilaksanakan oleh kaum perempuan namun cenderung dilaksanakan oleh kaum laki-laki.</p> <p>Dan juga persepsi masyarakat membuat hal itu terjadi. Meskipun demikian partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan jalan tersebut sudah dinilai cukup baik, melalui kegiatan rembuk jorong maupun musrenbang. Tetapi faktor aspirasi masyarakat nagari garabak yang belum terakomodir dalam realisasi pembangunan menginginkan tuntasnya pembangunan jalan.</p> <p>3. Sebab Internal</p> <p>Tidak semua pengambil keputusan mampu memahami konsep kesetaraan dan keadilan gender. Akibatnya, masih kurangnya analisis gender</p>

	<p>dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk mengakomodasi pembangunan yang responsif gender, pemerintah melalui Surat Edaran Menteri PU Nomor : 13/SE/M/2013 tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender. Dan juga masih belum tersedianya media informasi terkait pembangunan infrastruktur yang reponsif gender.</p> <p>4. Sebab Eksternal</p> <p>Dalam proses pembangunan infrastruktur masih minimnya peran serta tokoh masyarakat, sehingga rendahnya swadaya masyarakat dalam hal pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini juga diperparah dengan letak geografis daerah Kab. Solok yang berada pada daerah rawan akan bencana. Sehingga akses daerah yang sulit dijangkau.</p>		
PERENCANAAN KEGIATAN	Rencana Aksi	Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan muaro-garabak.	
		Tujuan	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan untuk menunjang akses mobilitas bagi seluruh lapisan masyarakat yang responsif gender
		Aktifitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan jalan yang responsif gender</li> <li>2. Sosialisasi permen pu yang responsif gender</li> <li>3. Penyusunan Juknis tentang pembangunan sarana, prasarana, pembangunan jalan dan jembatan yang responsif gender</li> <li>4. Meningkatkan koordinasi lintas sektorserta memonitoring dan evaluasi pembangunan jalan</li> <li>5. Pengadaan media informasi pembangunan infrastruktur yang responsif gender</li> </ol>
		Sumber daya	<p>Dana : 20.120.000.000</p> <p>SDM : Narasumber / fasilitator L : 1 P : 1</p> <p>Peserta L : 25 P : 25</p>
		Indikator Output	<p>Jumlah Peserta sosialisasi yang memahami permen PU laki laki = 25 Perempuan = 25</p> <p>Juknis yang tersusun = 400 exemplar</p>

			<p>Jalan yang terbangun dan termanfaatkannya= 5 Km</p> <p>Koordinasi yang terlaksana = 3 kali</p> <p>Jumlah media informasi yang disebarakan :  Leaflet = 100 exemplar  Pamflet = 100 exemplar  Baliho = 1 buah</p>
DAMPAK / MANFAAT (OUTCOME)	<p>Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan muaro sabia aia -garabak dari</p> <p>Jalan Kondisi Baik = 0 Km  Jalan Kondisi Sedang = 0,67 km  Jalan Kondisi Rusak Ringan = 1,250 Km  Jalan Kondisi Rusak Berat = 11,58 Km</p> <p>Menjadi 5 Km kondisi jalan mantap yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang responsif gender.</p>		

Aro Suka, Maret 2023  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN SOLOK



# 1. GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<p>Pilih Kebijakan/Program/Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NonKebakaran</p> <p><b>Kegiatan :</b> Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b> Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat.</p>	<p>Data pembuka wawasan</p> <p>Data Solok Dalam Angka tahun 2020 jumlah data Bencana Kebakaran sebanyak 79, tahun 2021 sebanyak 64 Kebakaran tahun 2022 sebanyak 155.</p> <p>Jumlah Korban Kebakaran pada Tahun 2020 sebanyak 184 orang, tahun 2021 sebanyak 178 orang dan tahun 2022 356 Orang.</p> <p>Terdapat 4 Unit Pemadam Kebakaran dan 4 Pos Pelayanan Kebakaran.</p> <p>Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran pada Tahun 2020 sebanyak 84 Orang, tahun 2021 sebanyak 84 Orang dan Tahun 2022 sebanyak 84 Orang.</p> <p>Peraturan BupatiSolok No. 28 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Solok</p> <p><b>Data Informasi Gender terkait antara lain:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum semua masyarakat yang mengikuti sosialisasi edukasi pencegahan dini kebakaran</li> <li>Masih adanya kesenjangan yang mengikuti sosialisasi antara Laki-laki dan Perempuan</li> </ol>	<p>Isu Gender : Sosialisasi dan Edukasi tentang Pencegahan Dini Bahaya Kebakaran</p> <p><b>Faktor Kesenjangan</b></p> <p>Keterlibatan mayoritas laki-laki pada kegiatan sosialisasi pencegahan dini bahaya kebakaran akan mengalami kesenjangan seperti sebagai berikut :</p> <p>a) ditinjau dari segi aspek aksesbelum adanya juknis Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.</p> <p>b) ditinjau dari aspek control, keterbatasan kehadiran Perempuan dibandingkan dengan laki-laki menyebabkankegiatan sosialisasi pencegahan dini bahaya kebakaran tidak tercapai sasaran.</p> <p>c) Ditinjau dari segi aspek manfaat sasaran program dankegiatan belum tertaksana sesuai kebutuhan.</p> <p>d) ditinjau dari aspek partisipasi, keterlibatan Perempuan lebih sedikit dari pada laki - laki.</p>	<p>Sebab Kesenjangan Internal</p> <p>Berdasarkan Peraturan Bupati Solok No. 28 / 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan BahayaKebakaran di KabupatenSolok, pada Pasal 9 ayat 2</p> <p>terdapat 2 Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK) dan terdapat 14 Pos Pemadam Kebakaran (PMK) namun yang sekarang baru 4 PMK.</p> <p>Masih kurangnya jumlahstruktur baik laki – laki mau pun perempuan yang bisa memberikan materi saat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat .</p> <p>Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat</p>	<p>Sebab Kesenjangan Eksternal</p> <p>Masih kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pencegahan dini bahaya kebakaran disebabkan karena kurangnya koordinasi dari lembaga terkait secara terpadu di Kabupaten Solok.</p>	<p><b>Reformulasi Tujuan</b></p> <p>tujuan: - Meningkatkan Pengetahuan danwawasan Masyarakat Baik Laki – laki maupun perempuan tentangdampak dan bahaya kebakaran</p>	<p><b>Rencana Aksi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan Bidang terkait untuk membuat petunjuk teknis Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.</li> <li>Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka kegiatan Sosialisasidan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.</li> <li>Penambahan Armada dan Pos Pelayanan Penanggulangan kebakaran.</li> <li>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi pada masyarakat tentang pencegahan dini penanggulangan bahaya kebakaran</li> </ol>	<p><b>Data Dasar (Baseline)</b></p> <p>Data Solok Dalam Angka tahun 2020 jumlah data Bencana Kebakaran sebanyak 79, tahun 2021 sebanyak 64 Kebakaran tahun 2022 sebanyak 155.</p> <p>Jumlah Korban Kebakaran pada Tahun 2020 sebanyak 184 orang, tahun 2021 sebanyak 178 orang dan tahun 2022 sebanyak 356 Orang.</p> <p>Terdapat 4 Unit Pemadam Kebakaran dan 4 Pos Pelayanan Kebakaran.</p> <p>Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran pada Tahun 2020 sebanyak 84 Orang, tahun 2021 sebanyak 84 Orang dan Tahun 2022 sebanyak 84 Orang.</p>	<p><b>Monitoring Indikator</b></p> <p><b>Input :</b> Anggaran Ratus Lima h Ratus Lima h Ribu delapuluh Rupaia</p> <p><b>Indikator O</b> -Jumlah masyarakatmendapatk edukasi penanggulangan setiap tahun</p> <p><b>Indikator O</b> -Terwujudn masyarakat dan bahaya</p> <p>- Kegiatan Peningkatk masyarakat Melaksanak dan Edukas masyarakat pencegah penanggula kebakaran</p>

Arosuka, 17 Maret 2023

Pih. KEPALA SATROL PP DAN DAMKA

DRG. ADA HERLINA, MM

NIP. 19691215 200212 2 002



NO	ASPEK	URAIAN								
1	Program Kegiatan  Sub Kegiatan	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Pemberdaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat.								
2 3	Indikator Kinerja Output Kegiatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi Pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahun. <b>Tujuan:</b> Meningkatkan Pengetahuan dan wawasan Masyarakat Baik Laki – laki maupun perempuan tentang pencegahan dini dan dampak dan bahaya kebakaran .								
4	Analisa Situasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Pembuka Wawasan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Solok Dalam Angka tahun 2020 jumlah data Bencana Kebakaran sebanyak 79, tahun 2021 sebanyak 64 Kebakaran tahun 2022 sebanyak 155 .</li> <li>• Jumlah Korban Kebakaran pada Tahun 2020 sebanyak 184 orang, tahun 2021 sebanyak 178 orang dan tahun 2022 356 Orang.</li> <li>• Terdapat 4 Unit Pemadam Kebakaran dan 4 Pos Pelayanan Kebakaran.</li> <li>• Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran pada Tahun 2020 Sebanyak 84 Orang, tahun 2021 sebanyak 84 Orang dan Tahun 2022 sebanyak 84 Orang.</li> </ul> </li> <li>2. Isu dan Faktor kesenjangan Gender Faktor Kesenjangan Akses Keterlibatan mayoritas Laki - laki pada kegiatan sosialisasi pencegahan dini bahaya kebakaran akan mengalami kesenjangan seperti sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ditinjau dari segi aspek, akses belum adanya juknis Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.</li> <li>b) ditinjau dari aspek control, keterbatasan kehadiran Perempuan dibandingkan dengan laki - laki menyebabkan kegiatan sosialisasi pencegahan dini bahaya kebakaran tidak tercapai sasaran.</li> <li>c) Ditinjau dari segi aspek manfaat sasaran program dan kegiatan belum terlaksana sesuai kebutuhan.</li> <li>d) ditinjau dari aspek partisipasi, keterlibatan Perempuan lebih sedikit dari pada laki - laki.</li> </ol> </li> <li>3. Kesenjangan Internal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan Peraturan Bupati Solok No. 28 tahun 2013 <i>tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Solok, pada Pasal 9 ayat 2</i> terdapat 2 Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK) dan terdapat 14 Pos Pemadam Kebakaran (PMK) namun yang sekarang baru 4 PMK.</li> <li>• Masih kurangnya jumlah Instruktur baik laki – laki maupun perempuan yang bisa memberikan materi saat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.</li> <li>• Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.</li> </ul> </li> <li>4. Kesenjangan Eksternal Masih kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pencegahan dini bahaya kebakaran disebabkan karena kurangnya koordinasi dari lembaga terkait secara terpadu di Kabupaten Solok.</li> </ol>								
5	Rencana Aksi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Komponen I</td> <td>Koordinasi dengan Bidang terkait untuk membuat petunjuk teknis Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.</td> </tr> <tr> <td>Komponen II</td> <td>Peningkatan penyediaan Sarana dan PraSarana dalam rangka kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.</td> </tr> <tr> <td>Komponen III</td> <td>Penambahan Armada dan Pos Pelayanan Penanggulangan kebakaran.</td> </tr> <tr> <td>Komponen IV</td> <td>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi pada masyarakat tentang pencegahan dini penanggulangan bahaya kebakaran</td> </tr> </table>	Komponen I	Koordinasi dengan Bidang terkait untuk membuat petunjuk teknis Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.	Komponen II	Peningkatan penyediaan Sarana dan PraSarana dalam rangka kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.	Komponen III	Penambahan Armada dan Pos Pelayanan Penanggulangan kebakaran.	Komponen IV	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi pada masyarakat tentang pencegahan dini penanggulangan bahaya kebakaran
Komponen I	Koordinasi dengan Bidang terkait untuk membuat petunjuk teknis Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.									
Komponen II	Peningkatan penyediaan Sarana dan PraSarana dalam rangka kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.									
Komponen III	Penambahan Armada dan Pos Pelayanan Penanggulangan kebakaran.									
Komponen IV	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi pada masyarakat tentang pencegahan dini penanggulangan bahaya kebakaran									
6	Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp . 46. 359.880,-								
7	Dampak/hasil Output Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya kebakaran</li> <li>• Menurunnya angka kejadian kebakaran di Kabupaten solok</li> <li>• Terbentuknya kelompok siaga Kebakaran di tiap nagari sebagai salah satu upaya pencegahan dini terhadap bahaya kebakaran.</li> </ul>								

Arosuka, 17 Maret 2023

**Plh. KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR**

Drg. AIDA HERLINA, MM

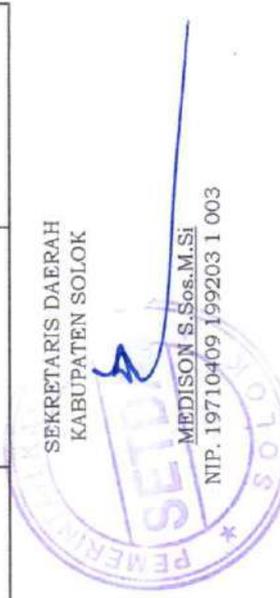
NIP. 196912152002122002



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAB)

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN : PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>Nama Kebijakan/Program/Kegiatan</b>	<b>Data Pembuka Wawasan</b>	<b>Faktor Kesenjangan</b>	<b>Isu Gender</b>	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>	<b>Kebijakan dan Rencana Kedeapan Reformulasi Tujuan</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Tolak Ukur Kinerja/Data Dasar (Base Line)</b>	<b>Langkah 9 Indikator Kinerja</b>
<b>Program :</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Bagian yang mengajukan Dokumen penatausahaan yang akan diverifikasi sebanyak : 12 Bagian	<b>Akses:</b> Terjadi kesenjangan jumlah SDM laki-laki dan perempuan karena perempuan dinilai lebih teliti dalam melakukan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	<b>Sebab Kesenjangan Internal</b> 1. Kesenjangan terhadap jumlah laki-laki dan perempuan terjadi karena perempuan dinilai lebih teliti dalam melakukan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	1. Penempatan pegawai yang kurang optimalnya	Terlaksananya Pelayanan Verifikasi dokumen penatausahaan/pertanggungjawaban BPP di Lingkungan Sekretariat Daerah yang Responsif Gender	1. Menambah jumlah SDM Laki-laki di Bagian Keuangan khususnya untuk verifikasi laporan pertanggung jawaban BPP	Input : Merencanakan dan menyiapkan kebutuhan SDM di Bagian Perencanaan dan Keuangan	<b>Indikator Kinerja :</b> Jumlah SDM Laki-laki yang melakukan verifikasi Dokumen pertanggung jawaban BPP
<b>Kegiatan :</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah SDM yang ada untuk melaksanakan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 3 Orang (25%)	<b>Partisipasi :</b> Dibutuhkan SDM Laki-laki untuk melakukan kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2. Belum optimalnya koordinasi dengan lintas sektor (BKPSDM)				Output : Terpenuhinya kebutuhan untuk SDM laki-laki di bagian Perencanaan dan Keuangan	<b>Outcome :</b> Meningkatnya kualitas hasil Verifikasi Dokumen Penatausahaan/Pertanggung jawaban BPP
<b>Sub Kegiatan :</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Perempuan : 2 Orang Laki-laki : 1 Orang		2. Penempatan pegawai yang belum mempertimbangkan komposisi antara laki-laki dan perempuan					



FORMAT GBS  
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

SKDP : SEKRETARIAT DAERAH  
Tahun Anggaran : 2023

NO	ASPEK	URAIAN
1	Program Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota : 4.01.01 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2	Output Kegiatan	: Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Analisis Situasi	: 1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilihan Gender) 2. Data Jumlah Bagian yang mengajukan Dokumen penatausahaan yang akan diverifikasi sebanyak : 12 Bagian 3. Data Jumlah SDM yang ada untuk melaksanakan Penatausahaan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD : 3 Orang (25%) Perempuan : 2 Orang Laki-laki : 1 Orang 4. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender 1. Kesenjangan terhadap jumlah laki-laki dan perempuan terjadi karena perempuan dinilai lebih teliti dalam melakukan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD. 2. Penempatan pegawai yang belum mempertimbangkan antara laki-laki dan perempuan.
4	Rencana Aksi	: 1. Sumber Daya Manusia : Menambah jumlah SDM Laki-laki (ASN) di Bagian Perencanaan dan keuangan khususnya untuk verifikasi laporan pertanggung jawaban BPP.  2. Alokasi Anggaran : Gaji ASN dimaksud sesuai dengan kelas jabatannya.

  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN SOLOK  
 MEDISON S.Sos.M.Si  
 NIP. 197104091992031003

**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
TAHUN 2024**

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	
<b>Program</b> Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	<b>Pembuka Data Wawasan 1.</b> Undang-undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan 2. Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan system Pelatihan Kerja Nasional di Daerah 3. Masih Banyaknya angkatan kerja yang belum bekerja yang dapat dilihat Data Solok dalam klaster	<b>Isu Gender : Masih Tingginya Angka Kalaupun Laki-laki</b>	<b>Faktor Kesenjangan</b>	<b>Sebab Kesenjangan Internal</b>	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>	<b>Reformulasi Tujuan</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Data Dasar ( Base Line )</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster Kompetensi	4. Angka Pengangguran Terbuka sesuai dengan Kabupaten Solok dalam angka pada tahun 2023 mengalami kenaikan 1,22% dari tahun sebelumnya	Akses : Jarak tempuh dari daerah domisili ke tempat kerja yang cukup jauh	1. Masih Kurangnya Paket Pelatihan yang diadakan	1. Masih adanya keinginan untuk bekerja sebagai pekerja dari pada menciptakan usaha kerja mandiri	Meningkatnya Kompetensi dan keahlian angkatan kerja bagi semua angkatan kerja	1. Mendata minat Pemuda dan pemuda atau calon tenaga kerja melalui Training Need Analysis	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2023 : 95,33 Laki-laki : 94,89 Perempuan : 95,90	Pelaksanaan Tarinning Need Analysis serta penyebaran informasi pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Sasaran Input : Rp. 550.062.905.- Output : Terlaksananya Training Need Analysis serta penyebaran informasi pelatihan-pelatihan Out Come : - Terdatanya minat pemuda-pemudi calon tenaga kerja di kabupaten Solok - Tersebarannya informasi Pelatihan-pelatihan yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK) - Terlaksananya Paket pelatihan untuk meningkatkan lapangan usaha bagi laki-laki	
<b>Sub Kegiatan</b> Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Angkatan Kerja Tahun 2023 : 193.296	Partisipasi : Kurang Minat bagi laki-laki dalam menciptakan lapangan usaha mandiri	2. Masih Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Intruktur yang ada	2. Belum maksimalnya dukungan orang tua, keluarga, dan tokoh masyarakat			Tingkat Pengangguran tahun 2023 : 4,67 Laki-laki : 5,11 Perempuan : 4,10 Jumlah Instruktur : 8 org Laki-laki: 3 org Perempuan: 5 org Yang sdh bersertifikat : 6 org		

	<p>Laki-laki : 110,488 Perempuan: 82,808</p> <p>Yang Bekerja: 184,261 Laki-laki: 104,845 Perempuan: 79,416</p> <p>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2023 : 95,33 Laki-laki : 94,89 Perempuan : 95,90</p> <p>Tingkat Pengangguran tahun 2023 : 4,67 Laki-laki : 5,11 Perempuan : 4,10</p>	<p>Kontrol : Kurangnya dukungan keluarga dalam penciptaan lapangan usaha mandiri</p> <p>Manfaat : Kurangnya pemahaman tentang pentingnya kompetensi atau keahlian dalam persaingan dunia kerja</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Arosuka,

Maret 2023

Kepala

Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Solok

Drs. ALIBER MULYADI

NIP : 19661226199403 1 005



**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GANDER BUDGET STATEMENT)  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

TAHUN ANGGARAN : 2024

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER GANDER BUDGET STATMANET		
SKPD	: DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
TAHUN ANGGARAN	: 2023	
PROGRAM	: Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	
KODE PROGRAM	: 2.07.03	
KEGIATAN	: Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi	
SUB KEGIATAN	: Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi	
HASIL/OUT PUT	: Meningkatnya tenaga kerja terampil, siap pakai dan mandiri secara berimbang antara laki-laki dan perempuan	
ANALISIS SITUASI	<p>1. <b>Data Pembuka Wawasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan</li> <li>- Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan system Pelatihan Kerja Nasional di Daerah</li> <li>- Masih banyaknya angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan yang dapat dilihat dari data Solok dalam Angka</li> </ul> <p><i>Angkatan Kerja Tahun 2023 : 193.296</i> Laki-laki : 110.488 Perempuan: 82.808</p> <p><i>Yang Bekerja: 184.261</i> Laki-laki: 104.845 Perempuan: 79.416</p> <p><i>Bukan angkatan kerja rahun 2022:</i> Yang sekolah : 23.579 Laki-laki : 10.875 Perempuan : 12.704</p> <p>2. <b>Isu dan Faktor kesenjangan Gender</b></p> <p><b>A</b> Faktor kesenjangan Akses : Jarak tempuh dari daerah domisili ke tempat kerja yang cukup jauh Partisipasi : Belum meratanya kesempatan kerja bagi perempuan dibandingkan laki-laki</p> <p>Kontrol : Kurang nya dukungan keluarga Manfaat : Kurangnya pemahaman tentang pentingnya kompetensi atau keahlian dalam persaingan dunia kerja</p> <p><b>B</b> Penyebab Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Instruktur yang ada</li> <li>2. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang representatif</li> </ol> <p><b>C</b> Penyebab Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang nya minat dari angkatan kerja untuk menciptakan lapangan kerja mandiri dan masih banyak yang berharap untuk menjadi ASN</li> <li>2. Belum maksimalnya dukungan orang tua, keluarga, dan tokoh masyarakat</li> </ol>	
RENCANA AKSI	<b>Komponen 1</b>	
	Tujuan	Terdatanya minat pemuda pemudi/calon tenaga kerja Kab Solok melalui Tranning Need Analysis serta menyebarkan informasi Pelatihan-pelatihan yang ada di BLK
	Alokasi Anggaran	Rp. 550.062.905.-
	<b>Total Anggaran</b>	Rp. 550.062.905.-
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	- Meningkatnya Kompetensi dan Keahlian Tenaga Kerja - Menurunnya Angka Pengangguran	

Kepala  
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Solok

Drs. ALIBER MULYADI  
NIP: 19661226199403 1 005

